



INSPEKTORAT PROVINSI
JAWA TENGAH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Jateng
gayeng



Kunjungi
Website

inspektorat.jatengprov.go.id

Ikuti Akun Resmi
INSPEKTORAT_JTG



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
I Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	ii
II Laporan Realisasi Anggaran SKPD	iii
III Neraca Komparatif SKPD	iv
IV Laporan Operasional SKPD	v
V Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	vi
VI Catatan Atas Laporan Keuangan	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan	14
Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	17
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	17
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	19
Bab 4 Kebijakan Akuntansi	22
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	22
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	29
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	29
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	31
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
5.1.1. Belanja	31
5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	36
5.2.1 Aset	36
5.2.2 Kewajiban	46
5.2.3 Ekuitas Dana	46
5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	46
5.3.1. Beban	46
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	51
Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	53
Bab 7 Penutup	56
Lampiran Tambahan	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 TELP. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351
SEMARANG 50132

surel: inspektorat@jatengprov.go.id, laman: inspektorat.jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Februari 2023

PENGGUNA ANGGARAN



DHONI WIDLANTO, S.Sos., M.Si

NIP. 19731015 199703 1 002



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

T.A 2022

- Laporan Realisasi Anggaran SKPD
- Neraca Komparatif SKPD
- Laporan Operasional SKPD
- Laporan Perubahan Ekuitas SKPD
- Catatan atas Laporan Keuangan



INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
40	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		-	-	-	-
41						
42	PENDAPATAN TRANSFER					
49	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
50						
51	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
62	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
63						
64	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		-	-	-	-
65						
66	BELANJA DAERAH					
67	BELANJA OPERASI					
68	Belanja Pegawai		19.181.659.000,00	18.975.318.279,00	98,92	17.275.812.067,00
69	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		9.445.943.000,00	9.306.100.004,00	98,52	8.884.177.699,00
70	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		9.517.616.000,00	9.466.118.275,00	99,46	8.391.634.368,00
71	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		218.100.000,00	203.100.000,00	93,12	-
77	Belanja Barang dan Jasa		12.859.357.000,00	12.775.369.480,00	99,35	12.263.624.026,00
78	Belanja Barang		1.460.227.000,00	1.416.925.835,00	97,03	932.760.905,00
79	Belanja Jasa		2.022.082.000,00	2.001.087.347,00	98,96	3.969.806.331,00
80	Belanja Pemeliharaan		582.855.000,00	579.801.196,00	99,48	990.346.684,00
81	Belanja Perjalanan Dinas		8.794.193.000,00	8.777.555.102,00	99,81	6.370.710.106,00
86	Belanja Bunga		-	-	-	-
93	Belanja Subsidi		-	-	-	-
98	Belanja Hibah		-	-	-	-
106	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
111	Jumlah Belanja Operasi		32.041.016.000,00	31.750.687.759,00	99,09	29.539.436.093,00
112						
113	BELANJA MODAL					
114	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		136.550.000,00	135.946.200,00	99,56	250.500.000,00
121	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		33.350.000,00	32.746.200,00	98,19	39.800.000,00
122	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		-	-	-	138.925.000,00
126	Belanja Modal Komputer		103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	71.775.000,00
137	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
142	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
147	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	-	2.339.900,00
148	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-	-	2.339.900,00
157	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
160	Jumlah Belanja Modal		136.550.000,00	135.946.200,00	99,56	252.839.900,00
161						
162	BELANJA TAK TERDUGA					
163	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
165	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
166						
167	BELANJA TRANSFER					
168	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
170	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
176	Jumlah Belanja Transfer		-	-	-	-
177						
178	JUMLAH BELANJA DAERAH		32.177.566.000,00	31.886.633.959,00	99,10	29.792.275.993,00
179						
180	SURPLUS/DEFISIT		(32.177.566.000,00)	(31.886.633.959,00)	99,10	(29.792.275.993,00)
181						
182	PEMBIAYAAN DAERAH					
183	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
193	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
195	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
198	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
204	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
212	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Und		-	-	-	-
214	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
215						
216	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
217	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
219	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
222	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-
228	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
236	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		-	-	-	-
238	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
239						
240	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
241						
242	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(32.177.566.000,00)	(31.886.633.959,00)	99,10	(29.792.275.993,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF
INSPEKTORAT
Per 31 Desember 2022

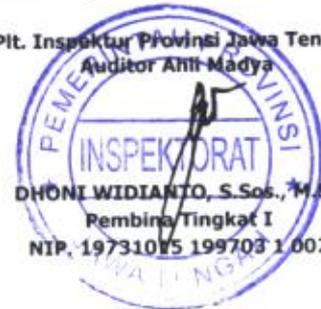
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2022	2021
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		-	-
13	Investasi Jangka Pendek		-	-
20	Piutang Pajak Daerah		-	-
37	Piutang Retribusi Daerah		-	-
41	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
45	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
68	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
74	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
77	Piutang Lainnya		-	-
83	Penyisihan Piutang		-	-
86	Beban Dibayar Dimuka		109.436.727,60	125.580.046,51
87	Beban Dibayar Dimuka		109.436.727,60	125.580.046,51
89	Persediaan		94.530,00	1.170.100,00
90	Barang Pakai Habis		94.530,00	1.170.100,00
93	JUMLAH ASET LANCAR		109.531.257,60	126.750.146,51
94				
95	INVESTASI JANGKA PANJANG			
96	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
102	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
105	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
106				
107	ASET TETAP			
108	Tanah		-	-
110	Peralatan dan Mesin		13.275.847.124,00	13.140.784.274,00
111	Alat Besar		201.852.000,00	208.302.000,00
112	Alat Angkutan		4.782.892.291,00	4.782.892.291,00
113	Alat Bengkel dan Alat Ukur		71.400.000,00	71.400.000,00
115	Alat Kantor dan Rumah Tangga		4.827.549.250,00	4.789.236.400,00
116	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		940.908.165,00	940.908.165,00
118	Alat Laboratorium		122.022.000,00	122.022.000,00
119	Alat Persenjataan		8.500.000,00	8.500.000,00
120	Komputer		2.320.723.418,00	2.217.523.418,00
130	Gedung dan Bangunan		13.139.885.450,00	13.139.885.450,00
131	Bangunan Gedung		13.125.575.450,00	13.125.575.450,00
134	Tugu Titik Kontrol/Pasti		14.310.000,00	14.310.000,00
135	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
140	Aset Tetap Lainnya		23.412.900,00	23.412.900,00
141	Bahan Perpustakaan		21.412.900,00	21.412.900,00
142	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		2.000.000,00	2.000.000,00
148	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
155	Akumulasi Penyusutan		(18.202.026.537,43)	(17.174.166.492,52)
156	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(11.733.332.669,86)	(11.053.539.024,03)
157	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(6.468.693.867,57)	(6.120.627.468,49)
160	JUMLAH ASET TETAP		8.237.118.936,57	9.129.916.131,48
161				
162	DANA CADANGAN			
163	Dana Cadangan		-	-
164	Dana Cadangan		-	-
165	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
166				
167	ASET LAINNYA			
168	Tagihan Jangka Panjang		-	-
171	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
173	Aset Tak Berwujud		311.165.000,00	311.165.000,00
174	Aset Tak Berwujud		311.165.000,00	311.165.000,00
175	Aset Lain-lain		111.319.915,00	111.319.915,00
176	Aset Lain-Lain		111.319.915,00	111.319.915,00
177	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(192.617.000,00)	(133.343.000,00)
178	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(192.617.000,00)	(133.343.000,00)
179	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(82.685.865,00)	(82.685.865,00)
180	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(82.685.865,00)	(82.685.865,00)
181	JUMLAH ASET LAINNYA		147.182.050,00	206.456.050,00
182				
183	JUMLAH ASET		8.493.832.244,17	9.463.122.327,99
184				
185	KEWAJIBAN			
186	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
187	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
197	Utang Bunga		-	-
204	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-

NO	URAIAN	REFF	2022	2021
209	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
215	Pendapatan Dibayar Dimuka		-	-
220	Utang Belanja		-	-
236	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
240	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
241				
242	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
243	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
247	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
251	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
255	Utang kepada Masyarakat		-	-
257	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
258				
259	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
260				
261	EKUITAS			
262	EKUITAS		(23.392.801.714,83)	(20.329.153.665,01)
263	Ekuitas		9.562.308.767,99	10.480.775.496,91
264	Surplus/Defisit-LO		(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)
265	Ekuitas SAL		-	-
272	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		31.886.633.959,00	29.792.275.993,00
273	RK PPKD		31.886.633.959,00	29.792.275.993,00
274	JUMLAH EKUITAS		8.493.832.244,17	9.463.122.327,99
275				
276	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		8.493.832.244,17	9.463.122.327,99

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

Pit. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya



DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022	2021	Perubahan (+/-)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
40	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
41						
42	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
49	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	#DIV/0!
50						
51	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
62	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		-	-	-	#DIV/0!
63						
64	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH -LO		-	-	-	#DIV/0!
65						
66	BEBAN					
67	BEBAN OPERASIONAL					
68	Beban Pegawai		18.975.318.279,00	17.275.812.067,00	1.699.506.212,00	9,84
69	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		9.306.100.004,00	8.884.177.699,00	421.922.305,00	4,75
70	Beban Tambahan Penghasilan ASN		9.466.118.275,00	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00	12,80
71	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		203.100.000,00	-	203.100.000,00	-
78	Beban Barang dan Jasa		12.792.588.368,91	12.213.838.195,82	578.750.173,09	4,74
79	Beban Barang		1.418.001.405,00	935.001.905,00	482.999.500,00	51,66
80	Beban Jasa		2.017.230.665,91	3.957.039.500,82	(1.939.808.834,91)	(49,02)
81	Beban Pemeliharaan		579.801.196,00	951.086.684,00	(371.285.488,00)	(39,04)
82	Beban Perjalanan Dinas		8.777.555.102,00	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00	37,78
86	Beban Bunga		-	-	-	-
93	Beban Subsidi		-	-	-	-
98	Beban Hibah		-	-	-	-
106	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	-
111	Beban Penyisihan Piutang		-	-	-	-
119	Beban Penyusutan dan Amortisasi		1.186.320.484,91	1.319.403.899,10	(133.083.414,19)	(10,09)
120	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		778.960.085,83	912.063.500,03	(133.083.414,20)	(14,59)
121	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		348.066.399,08	348.066.399,07	0,01	0,00
125	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		59.274.000,00	59.274.000,00	-	-
126	Beban Lain-Lain		883.350,00	875.000,00	8.350,00	0,95
127	Beban Lain-Lain		883.350,00	875.000,00	8.350,00	0,95
128	Jumlah Beban Operasional		32.955.110.482,82	30.809.929.161,92	2.145.181.320,90	6,96
129						
130						
131	BEBAN TRANSFER					
140	Jumlah Beban Transfer		-	-	-	-
141						
142	JUMLAH BEBAN		32.955.110.482,82	30.809.929.161,92	2.145.181.320,90	6,96
143						
144	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL		(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)	(2.145.181.320,90)	6,96
145						
146	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
147	SURPLUS NON OPERASIONAL					
160	Jumlah Surplus Non Operasional		-	-	-	-
161						
162	DEFISIT NON OPERASIONAL					
175	Jumlah Defisit Non Operasional		-	-	-	-
176						
177	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-	-	-
178						
179	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)	(2.145.181.320,90)	6,96
180						
181	POS LUAR BIASA					
182	BEBAN LUAR BIASA					
186	Jumlah Beban Luar Biasa		-	-	-	-
187						
188	JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-	-	-
189						
190	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL		(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)	(2.145.181.320,90)	6,96

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Pt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2022

Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

NO	URAIAN	REF	2022	2021
1	Ekuitas Awal		9.463.122.327,99	10.480.775.496,95
2	Surplus/Defisit-LO		(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)
3	RK PPKD		31.886.633.959,00	29.792.275.993,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		99.186.440,00	(0,04)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas			
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya			
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang			
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan			
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen			
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen			
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen			
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		-	577.548.835,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD			577.548.835,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		99.186.440,00	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		(99.186.440,00)	
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan		99.186.440,00	(577.548.835,04)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan			(577.548.835,04)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		99.186.440,00	
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklas Pemanfaatan			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi			
4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi			
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan			
4.13	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang			
4.14	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang			

4.15	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain			
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain			
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain			
5	Ekuitas Akhir		8.493.832.244,17	9.463.122.327,99
Ekuitas Neraca			8.493.832.244,17	9.463.122.327,99
Difference				

Plt. Inspektur Arbi (P) Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun laporan konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya..
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil

operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomil;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
- b. Neraca
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Operasional (LO)
LO merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. CaLK juga penyajian informasi yang diharuskan atau dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian kewajaran laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- o. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0018086/2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0018086/2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, maka sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro

- 2.2. Kebijakan Keuangan
- Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab 4 Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
- Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
 - 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
 - 5.3.3. Surplus Defisit Non Operasional
 - 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD
- Bab 7 Penutup
- Lampiran Tambahan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 2

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Ekonomi Makro

Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan III-2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 396.643,77 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp. 264.862,50 miliar. Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan III-2022 tumbuh sebesar 1,32 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 13,13 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 11,22 persen.

Ekonomi Jawa Tengah Triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,28 persen (y-on-y), melambat dari capaian Triwulan II-2022 yang tumbuh sebesar 5,66 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan yang tumbuh sebesar 98,53 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 17,05 persen.

Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan Triwulan III-2022 (c-to-c) juga tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,36 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 79,35 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif hingga Triwulan III-2022 yang mengalami kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 12,93 persen.

Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2022 dengan kontribusi sebesar 33,40 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 58,42 persen.

a. PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha

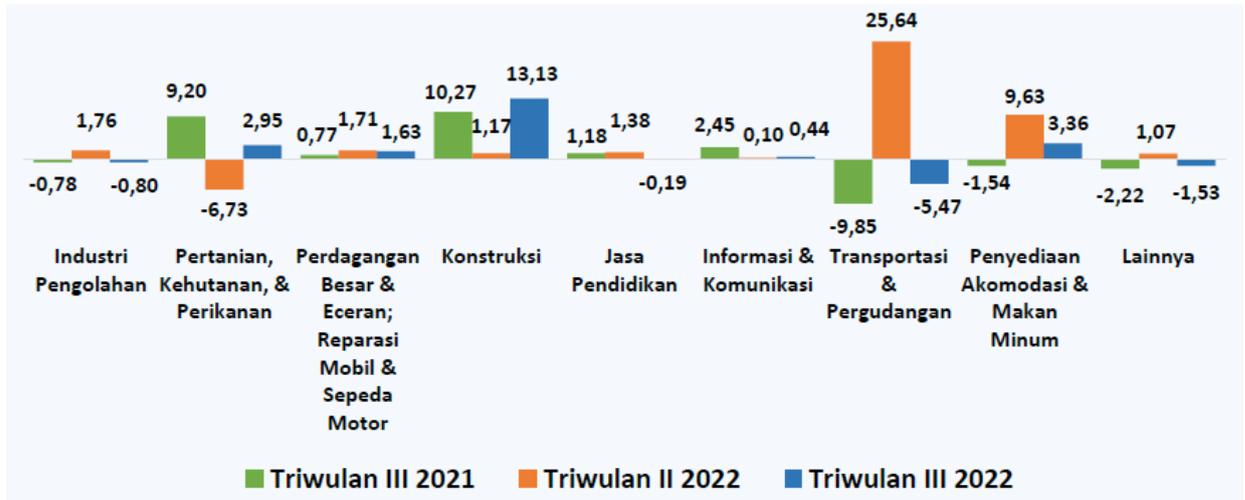
1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2022 Terhadap Triwulan II-2022 (q-to-q)

Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2022 terhadap triwulan II-2022 (q-to-q) tumbuh sebesar 1,32 persen. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding capaian pada triwulan II-2022 (q-to-q) yang tumbuh sebesar 1,47 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Konstruksi sebesar 13,13 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,36 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,95 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan mengalami kontraksi sebesar -0,80 persen, sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih tumbuh sebesar 1,63 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Jasa Perusahaan sebesar 0,96 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,94 persen serta Real Estate sebesar 0,87 persen. Sementara itu, selain Industri Pengolahan, masih terdapat enam lapangan usaha lain yang mengalami kontraksi diantaranya Jasa Lainnya yang terkontraksi sebesar -6,16 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar -5,47 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terkontraksi -4,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terkontraksi -1,97 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi terkontraksi sebesar -0,23 persen dan Jasa Pendidikan sebesar -0,19 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III-2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi

oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 33,40 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,77 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,58 persen; dan Konstruksi sebesar 11,56 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 72,31 persen.

Gambar 2.1. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)



2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2022 Terhadap Triwulan III-2021 (y-on-y)

Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,28 persen dibanding triwulan III-2021 (y-on-y), oertumbuhan ini melambat dari capaian triwulan II-2022 yang tumbuh sebesar 5,66 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Transportasi dan Pergudangan sebesar 98,53 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,33 persen dan Jasa Lainnya sebesar 12,16 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 4,04 persen dan 4,31 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan keuda mengalami kontraksi sebesar -1,17 persen. Lapangan usaha lainnya yang tumbuh positif di antaranya Jasa Perusahaan sebesar 9,87 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,06 persen; Real Estate sebesar 6,61 persen.

Kemudian, selain lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, masih terdapat dua lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh negatif sebesar -12,04 persen, disusul oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang terkontraksi sebesar -3,24 persen.

Gambar 2.2. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)



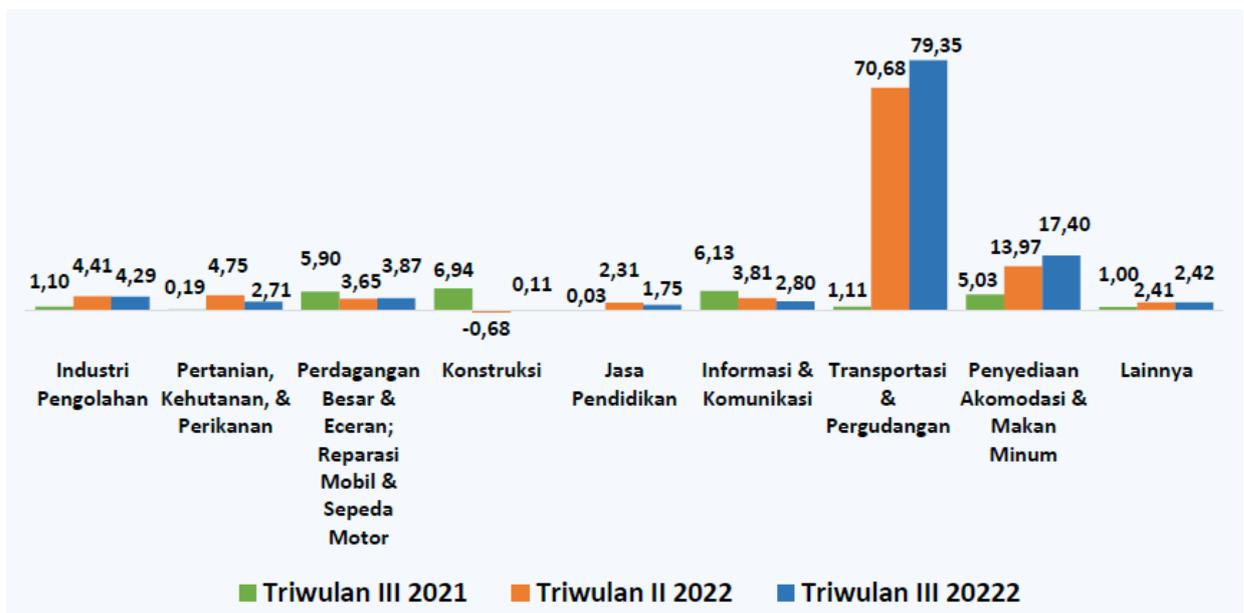
3. Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Triwulan III-2022 Terhadap Kumulatif Triwulan III-2021 (c-t-c)

Ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,36 persen dibandingkan dengan kumulatif sampai dengan triwulan III-2021 (c-to-c). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Transportasi dan Pergudangan sebesar 79,35 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,40 persen dan Jasa Lainnya sebesar 15,29 persen. Kemudian, keempat lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,29 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,71 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 3,87 persen dan Konstruksi tumbuh sebesar 0,11 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,91 persen; Jasa Perusahaan sebesar 6,31 persen dan Real Estate sebesar 5,73 persen.

Akan tetapi, masih terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar -6,60 persen; disusul lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,13 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -0,05 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif sampai dengan Triwulan III-2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 33,94 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,97 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,54 persen; dan Konstruksi sebesar 10,65 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 72,10 persen.

Gambar 2.3. Pertumbuhan PDRD Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (c-t-c) (persen)



b. PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2022 Terhadap Triwulan II-2022 (q-t-q)

Ekonomi Jawa Tengah triwulan III-2022 dibanding triwulan II-2022 tumbuh sebesar 1,32 persen (q-to-q). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mengalami kontraksi

sebesar -0,08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang berkontraksi sebesar -0,10 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 11,22 persen; diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 1,04 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,02 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 60,30 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,67 persen; komponen PMTB sebesar 32,63 persen; Komponen PK-P sebesar 6,00 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,23 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,99 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 41,82 persen.

Gambar 2.4. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2022 Terhadap Triwulan III-2021 (y-on-y)

Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang berkontraksi sebesar -4,05 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yang tumbuh sebesar 17,05 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,76 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,94 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,90 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 15,00 persen.

3. Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Triwulan III-2022 Terhadap Kumulatif Triwulan III-2021 (c-to-c)

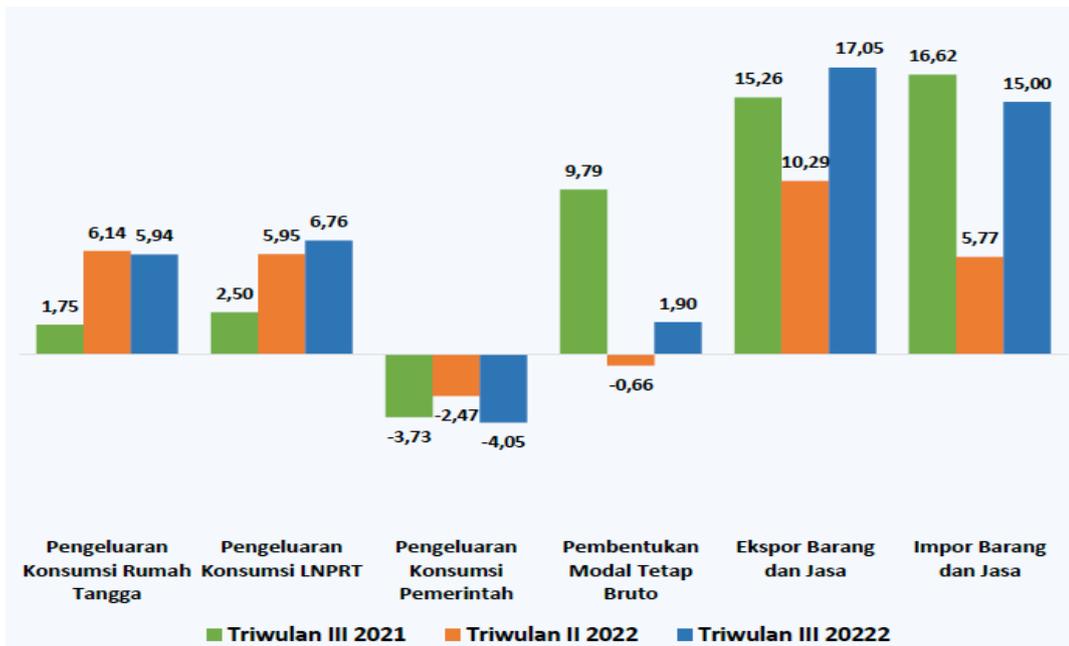
Ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,36 persen dibanding kumulatif sampai dengan triwulan III-2021 (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah (PK-P) yang berkontraksi -2,71 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 12,93 persen; diikuti Komponen PKRT sebesar 5,46 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 5,34 persen dan Komponen PMTB sebesar 0,38 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar

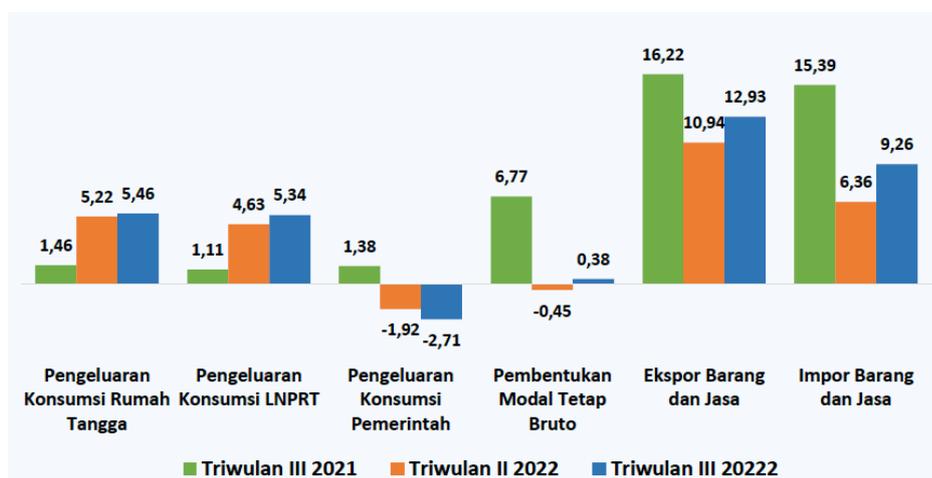
Daerah) tumbuh sebesar 9,26 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 60,36 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,89 persen; komponen PMTB sebesar 30,25 persen; Komponen PK-P sebesar 5,54 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,23 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,99 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 39,26 persen.

Gambar 2.5. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y) (persen)



Gambar 2.6. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)



Tabel 2.1. PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstansi 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw III-2021	Triw II-2022	Triw III-2022	Triw III-2021	Triw II-2022	Triw III-2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	52,57	51,98	54,62	33,86	32,50	33,46
B. Pertambangan dan Penggalian	9,61	9,16	9,29	5,84	5,09	5,13
C. Industri Pengolahan	121,42	131,46	132,49	82,75	86,79	86,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,35	0,36	0,37	0,30	0,31	0,31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,23	0,19	0,19	0,18
F. Konstruksi	42,04	39,24	45,83	28,16	25,28	28,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	49,12	52,29	53,87	37,07	38,05	38,67
H. Transportasi dan Pergudangan	7,19	15,90	15,40	5,50	11,56	10,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum	10,60	13,24	13,91	7,95	9,56	9,88
J. Informasi dan Komunikasi	15,46	15,55	15,62	15,80	15,87	15,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,79	11,79	11,95	6,88	6,95	6,93
L. Real Estat	5,89	6,32	6,41	4,74	5,01	5,06
M,N. Jasa Perusahaan	1,37	1,56	1,59	0,93	1,01	1,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,14	9,56	9,12	5,62	6,37	6,08
P. Jasa Pendidikan	16,26	16,47	16,43	9,79	9,87	9,86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,40	3,54	3,57	2,34	2,39	2,40
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,04	6,27	5,94	3,86	4,61	4,33
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	359,48	384,92	396,64	251,58	261,41	264,86

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2022 terhadap Triw II-2022 (q-to-q)	Triw III-2022 terhadap Triw III-2021 (y-on-y)	Triw I s.d. III-2022 terhadap Triw I s.d. III-2021 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triw III-2022		
				Triw III-2022 terhadap Triw II-2022 (q-to-q)	Triw III-2022 terhadap Triw III-2021 (y-on-y)	Triw I s.d. III-2022 terhadap Triw I s.d. III-2021 (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,95	-1,17	2,71	0,37	-0,16	0,36
B Pertambangan dan Penggalian	0,82	-12,04	-6,60	0,01	-0,28	-0,15
C Industri Pengolahan	-0,80	4,04	4,29	-0,26	1,33	1,43
D Pengadaan Listrik, Gas	0,94	5,50	7,91	0,00	0,01	0,01
E Pengadaan Air	-1,97	-3,24	-0,05	0,00	0,00	0,00
F Konstruksi	13,13	1,54	0,11	1,27	0,17	0,01
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,63	4,31	3,87	0,24	0,63	0,57
H Transportasi dan Pergudangan	-5,47	98,53	79,35	-0,24	2,15	1,88
I Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	3,36	24,33	17,40	0,12	0,77	0,56
J Informasi dan Komunikasi	0,44	0,84	2,80	0,03	0,05	0,18
K Jasa Keuangan	-0,23	0,67	1,38	-0,01	0,02	0,04
L Real Estate	0,87	6,61	5,73	0,02	0,12	0,11
M, N Jasa Perusahaan	0,96	9,87	6,31	0,00	0,04	0,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,58	8,06	-0,13	-0,11	0,18	0,00
P Jasa Pendidikan	-0,19	0,67	1,75	-0,01	0,03	0,07
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,43	2,89	3,39	0,00	0,03	0,03
RS, TU Jasa lainnya	-6,16	12,16	15,29	-0,11	0,19	0,24
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,32	5,28	5,36	1,32	5,28	5,36

Tabel 2.3. Struktur PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

Lapangan Usaha		2021			2022		
		Triw I	Triw II	Triw III	Triw I	Triw II	Triw III
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,71	13,63	14,62	14,67	13,50	13,77
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,48	2,54	2,68	2,49	2,38	2,34
C.	Industri Pengolahan	34,13	34,47	33,78	34,28	34,15	33,40
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	10,57	10,76	11,69	10,15	10,19	11,56
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,76	13,90	13,66	13,43	13,59	13,58
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,29	2,31	2,00	3,25	4,13	3,88
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,05	3,07	2,95	3,15	3,44	3,51
J.	Informasi dan Komunikasi	4,27	4,30	4,30	4,13	4,04	3,94
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	3,03	3,00	3,05	3,06	3,01
L.	Real Estat	1,70	1,67	1,64	1,66	1,64	1,62
M,N.	Jasa Perusahaan	0,41	0,40	0,38	0,40	0,41	0,40
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,50	2,80	2,26	2,32	2,48	2,30
P.	Jasa Pendidikan	4,52	4,56	4,52	4,32	4,28	4,14
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,97	0,95	0,95	0,92	0,90
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,47	1,44	1,40	1,60	1,63	1,50
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.4. PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw III-2021	Triw II-2022	Triw III-2022	Triw III-2021	Triw II-2022	Triw III-2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	213,24	235,75	239,16	146,05	154,85	154,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,23	4,80	4,89	2,59	2,73	2,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25,21	23,34	23,81	14,79	14,21	14,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	119,13	111,71	129,44	77,61	71,11	79,08
5. Perubahan Inventori	3,30	3,87	3,91	2,55	3,03	2,97
6. Ekspor Barang dan Jasa	141,79	159,13	161,33	94,64	109,64	110,79
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	147,42	153,68	165,90	86,65	94,16	99,65
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	359,48	384,92	396,64	251,58	261,41	264,86

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triw III-2022 terhadap Triw II-2022 (q-to-q)	Triw III-2022 terhadap Triw III-2021 (y-on-y)	Triw I s.d. III-2022 terhadap Triw I s.d. III-2021 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triw III-2022		
				Triw III-2022 terhadap Triw II-2022 (q-to-q)	Triw III-2022 terhadap Triw III-2021 (y-on-y)	Triw I s.d. III-2022 terhadap Triw I s.d. III-2021 (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,08	5,94	5,46	-0,05	3,45	3,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,02	6,76	5,34	0,01	0,07	0,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,10	-4,05	-2,71	-0,01	-0,24	-0,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,22	1,90	0,38	3,05	0,59	0,11
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	1,04	17,05	12,93	0,44	6,41	5,07
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5,82	15,00	9,26	2,10	5,17	3,21
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,32	5,28	5,36	1,32	5,28	5,36

Tabel 2.6. Struktur PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

Komponen	2021			2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,88	60,85	59,32	59,51	61,25	60,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,18	1,19	1,18	1,20	1,25	1,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,91	6,87	7,01	4,51	6,06	6,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,54	30,94	33,14	28,98	29,02	32,63
5. Perubahan Inventori	0,64	0,93	0,92	0,97	1,01	0,99
6. Ekspor Barang dan Jasa	40,61	41,19	39,44	40,71	41,34	40,67
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	38,76	41,97	41,01	35,88	39,93	41,82
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.2. Kebijakan Keuangan

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

Sedangkan misi sebagai penjabaran visi diatas adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut:

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru mengaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi kedua, yaitu “Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota”. Selain itu secara tersirat, Inspektorat juga memiliki peran terhadap misi keempat, yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan” , dalam konteks bahwa Inspektorat juga turut serta mewujudkan kualitas SDM APIP yang lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih profesional lagi kedepannya.

Selanjutnya selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, diharapkan dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta *mindset* dan *culture set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: **“Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”**. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan kedepannya adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem *e-audit*. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu: tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP, tercapainya Nilai 3,19 Maturitas SPIP.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD Provinsi Jawa Tengah, diprioritaskan pada peningkatan pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang didukung dengan 2 program utama, yaitu :

2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang terdiri 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, dengan outcome persentase persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan (audit/ reuiu/ monitoring/ evaluasi);
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang terdiri 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan *outcome* Persentase jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan konsultasi.

Adapun 1 program pendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

Pada prinsipnya, kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang bergerak dalam bidang pengawasan tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal diarahkan untuk :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk :

2.2.2.1. Belanja Operasional

Belanja Operasional merupakan belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan pengeluaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek , yaitu terdiri atas:

1. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
2. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Anggaran Pos Belanja Tahun Anggaran 2022 setelah adanya perubahan adalah Rp. 32.177.566.000 sedangkan realisasinya adalah Rp. 31.886.633.959,00 (99,1%). Proporsi terbesar realisasi untuk tahun anggaran 2022 adalah untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 31.750.687.759,00, sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 135.946.200,00 dari total belanja sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.1.

GAMBAR 3.1.
PROPORSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Secara rinci, proporsi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 untuk Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 18.975.318.279,00 atau sebesar 59,76% dari total Belanja Operasi, sedangkan Belanja Barang dan Jasa menyerap 40,24% dari total Belanja Operasi atau sebesar Rp. 12.775.369.480,00 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.2.

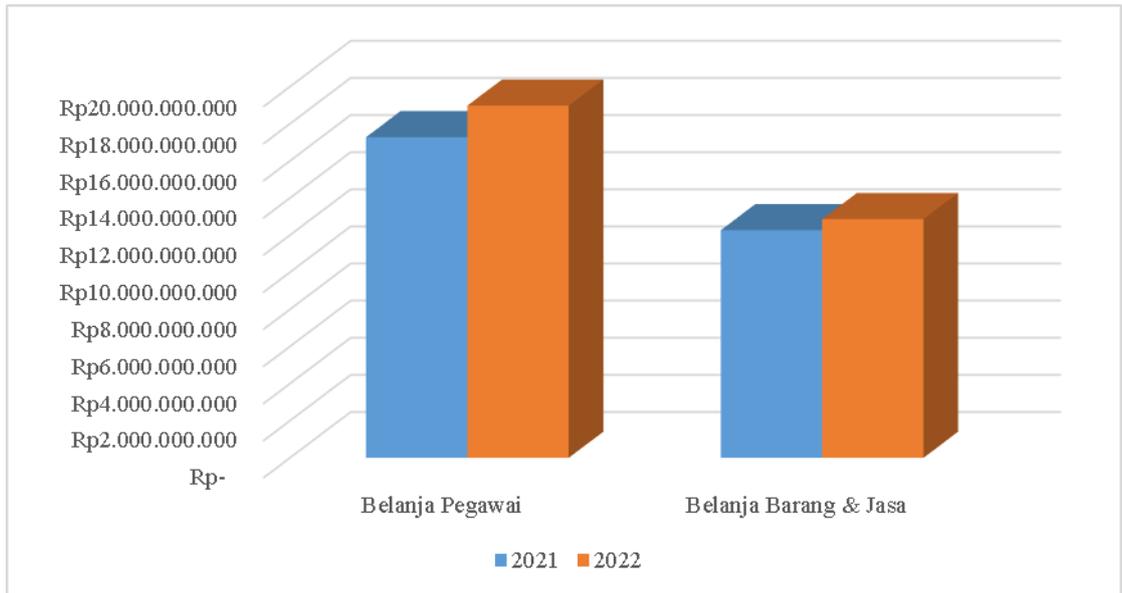
GAMBAR 3.2
PROPORSI BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Komposisi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Perbandingan Belanja Operasi tahun anggaran 2022 dan 2021 ditunjukkan dalam gambar 3.3. Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 18.975.318.279,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.699.506.212,00 atau 9,84% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp.17.275.812.067,00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp. 12.859.357.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 511.745.454,00 atau 4,17% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 12.263.624.026,00.

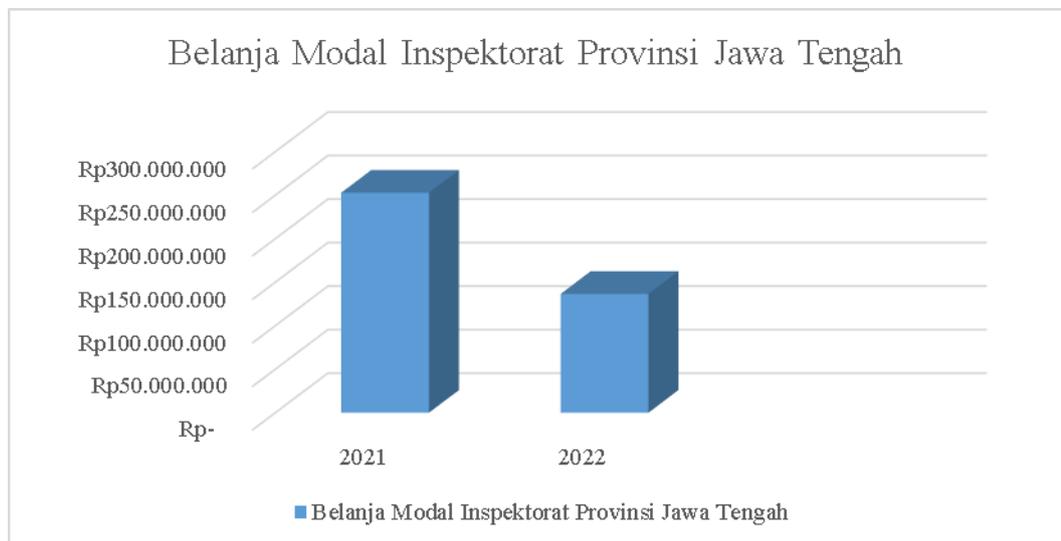
GAMBAR 3.3
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2021 DAN 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Perbandingan Belanja Modal tahun anggaran 2022 dan 2021 ditunjukkan dalam gambar 3.4. Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp. 136.550.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 114.553.800,00 atau 45,73% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 252.839.900,00.

GAMBAR 3.4
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2021 DAN 2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yaitu penetapan perubahan anggaran pada triwulan IV, sehingga kegiatan pada anggaran perubahan dilaksanakan dalam bulan November dan Desember 2022. Solusi untuk mengatasi permasalahan dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan mengefisienkan anggaran yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Inspektorat
Fungsi : 4
Sub Fungsi : 05
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 95%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.018.000	45.286.250	100	85,42	Honor Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP tidak terbayarkan karena tidak terselenggaranya acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah disebabkan kesibukan instansi pusat pada akhir tahun
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.228.000	35.121.094	100	99,70	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.963.559.000	18.772.218.279	100	98,99	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	172.600.000	171.644.450	100	99,45	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	192.407.000	190.829.030	100	99,18	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.500.000	121.512.950	100	93,83	Direncanakan mengadakan bimbingan teknis dengan 3 narasumber, namun realisasinya hanya 2 narasumber
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	5.000.000	100	100,00	

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 95%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	163.299.000	163.255.950	100	99,97	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.082.000	244.081.781	100	100,00	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.550.000	135.946.200	100	99,56	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	248.161.000	242.468.825	100	97,71	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	681.900.000	644.210.529	100	94,47	Pada bulan Januari-September penggunaan listrik cukup minim, sehingga sisa anggaran cukup banyak. Pada bulan Oktober dilakukan pergeseran anggaran, ternyata penggunaan listrik melonjak. Pada awal november diajukan penambahan anggaran kembali diiringi efisiensi penggunaan listrik. Bulan November-Desember penggunaan listrik tidak sebesar bulan Oktober, sehingga terdapat sisa anggaran tersebut.
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.332.820.000	1.330.247.763	100	99,81	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.100.000	203.100.000	100	93,12	Kekosongan jabatan Inspektur dan Irbansus, sehingga honor PA tidak terserap (Januari-Juni) dan honor KPA (Juli-Desember)
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.830.000	295.640.939	100	99,26	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.594.000	241.051.088	100	99,78	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.290.000	129.780.328	100	99,61	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.886.414.000	1.882.077.577	100	99,77	
2	Reviu Laporan Kinerja	46.250.000	45.440.820	100	98,25	
3	Reviu Laporan Keuangan	780.000.000	779.827.375	100	99,98	
4	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	976.060.000	974.677.405	100	99,86	
5	Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIP Evaluasi RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	644.437.000	644.363.170	100	99,99	

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 95%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
II	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.864.800.000	1.864.488.617	100	99,98	
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	622.574.000	620.817.239	100	99,72	
II	Pendampingan dan Asistensi					
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	92.624.000	92.556.000	100	99,93	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	759.976.000	755.983.887	100	99,47	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	965.713.000	963.040.853	100	99,72	
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	292.780.000	291.965.560	100	99,72	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, dalam hal ini Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:

1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pimpinan entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- c. Kebijakan akuntansi dipakai oleh suatu entitas pelaporan dan akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
- d. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- e. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- f. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca,

laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

- g. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau presentase.
- h. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, dan kesalahan mendasar.
- i. Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru dan dijelaskan dalam CaLK.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

a. Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah, kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah daerah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- 3) Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendapatan LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan LO diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

a. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan asas bruto.

b. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Beban dapat diukur dengan cara sebagai berikut:
 - a) Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan/kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/KPA.

- b) Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan/kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- c) Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan/kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA dan/atau pemakaian persediaan untuk belanja tersebut.
- d) Beban Perjalanan Dinas dicatat sebesar resume tagihan/kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA.
- e) Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dicatat sebesar resume tagihan/kewajiban pembayaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui PA/KPA dan/atau pemakaian persediaan untuk belanja tersebut.
- f) Beban Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Perhitungan bunga didasarkan pada naskah perjanjian pemberian pinjaman.
- g) Beban Subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari Bendahara Umum Daerah.
- h) Beban Hibah Uang diakui sesuai nilai nominal pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan Beban Hibah dalam bentuk barang/jasa diakui sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.
- i) Beban Bantuan Sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga.
- j) Beban Penyusutan dan Amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- k) Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.
- l) Beban Tak Terduga dicatat sebesar resume tagihan/kewajiban pembayaran belanja tak terduga oleh pihak ketiga.

4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi dan dilakukan berdasarkan asas bruto.

5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- b. Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dihitung dari tanggal perolehan.
- c. Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan di bank, dan setara kas.

- d. Kas dan setara kas diakui saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
- e. Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.

6. Kebijakan Akuntansi Piutang dan Beban Dibayar Dimuka

a. Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya.
- 3) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 4) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

b. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja

- 1) Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.
- 2) Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan.
- 3) Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.

7. Kebijakan Akuntansi Investasi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- c. Pengakuan Investasi:
 - 1) Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang, dan
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - 2) Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang, dan
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- d. Pengukuran Investasi
 - 1) Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

- 2) Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- e. Penyajian/Pengungkapan
- 1) Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.
 - 2) Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.
 - 3) Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan merupakan aset yang berupa :
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Persediaan diakui pada saat :
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- d. Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.
- e. Persediaan disajikan sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa;
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan, irigasi & jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- c. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah :
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- d. Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehannya.
- e. Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :
 - 1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
 - 2) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,-.
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,-.
 - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- g. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;
 - 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
- h. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan penyusutan metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- i. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaannya/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya.
- j. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
- k. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
- l. Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- m. Perlakuan khusus, penyajian aset bersejarah tidak harus di neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

10. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- c. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- d. Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

11. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Aset lainnya antara lain tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.

12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi :
 - b. Kewajiban jangka pendek
 - 1) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dan masa pembayarannya/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya.
 - 3) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - 4) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam neraca dan CaLK.
 - c. Kewajiban jangka panjang
 - 1) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - 3) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
 - 4) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal.

13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

14. Kebijakan Akuntansi Koreksi

- a. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :
 - 1) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi di periode sebelumnya;
 - 2) Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistematis tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat

terjadinya pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan/

- c. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas, dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam pelaporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*);
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan seluruh aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- e. Kekayaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perpetual).

Dalam menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya, adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (*adjustment*) ke tahun berikutnya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;

- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya.
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- m. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;
- n. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- o. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022. Anggaran dan realisasi APBD TA 2022 adalah sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

5.1.1 BELANJA DAERAH Rp. 31.886.633.959,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.32.177.566.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.31.886.633.959,00 atau 99,10%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.29.792.275.993,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp.2.094.357.966,00 atau 7,03% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Operasional	32.041.016.000,00	31.750.687.759,00	99,09	29.539.436.093,00	2.211.251.666,00	7,49
2 Belanja Modal	136.550.000,00	135.946.200,00	99,56	252.839.900,00	(116.893.700,00)	(46,23)
Jumlah	32.177.566.000,00	31.886.633.959,00	99,10	29.792.275.993,00	2.094.357.966,00	7,03

5.1.1.2 BELANJA OPERASIONAL Rp. 31.750.687.759,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp.32.041.016.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.750.687.759,00 atau 99,09%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.29.539.436.093,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.211.251.666,00 atau 7,49% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Pegawai	19.181.659.000,00	18.975.318.279,00	98,92	17.275.812.067,00	1.699.506.212,00	9,84
2 Belanja Barang dan Jasa	12.859.357.000,00	12.775.369.480,00	99,35	12.263.624.026,00	511.745.454,00	4,17
Jumlah	32.041.016.000,00	31.750.687.759,00	99,09	29.539.436.093,00	2.211.251.666,00	7,49

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp. 18.975.318.279,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.19.181.659.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.975.318.279,00 atau 98,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.17.275.812.067,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.699.506.212,00 atau 9,84% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.445.943.000,00	98,52	8.884.177.699,00	421.922.305,00	4,75
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.517.616.000,00	99,46	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00	12,80
3	Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	218.100.000,00	93,12	0	203.100.000,00	#DIV/0!
	Jumlah	19.181.659.000,00	98,92	17.275.812.067,00	1.699.506.212,00	9,84

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 9.306.100.004,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp.9.445.943.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.306.100.004,00 atau 98,52%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.8.884.177.699,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.421.922.305,00 atau 4,75% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	6.638.000.000,00	99,22	6.324.410.050,00	261.787.830,00	4,14
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	625.000.000,00	98,66	618.228.744,00	(1.628.564,00)	(0,26)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.000.000,00	85,25	107.790.000,00	(1.230.000,00)	(1,14)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	806.900.000,00	97,81	697.690.000,00	91.540.000,00	13,12
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	150.000.000,00	93,89	118.240.000,00	22.600.000,00	19,11
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	380.000.000,00	97,84	350.440.380,00	21.363.900,00	6,10
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	67.000.000,00	75,40	49.762.642,00	753.705,00	1,51
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	153.000,00	62,31	81.017,00	14.317,00	17,67
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	595.000.000,00	99,18	565.440.074,00	24.708.345,00	4,37
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.755.000,00	98,34	13.030.140,00	496.751,00	3,81
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	45.135.000,00	89,91	39.064.652,00	1.516.021,00	3,88
	Jumlah	9.445.943.000,00	98,52	8.884.177.699,00	421.922.305,00	4,75

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.9.466.118.275,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp.9.517.616.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.466.118.275,00 atau 99,46%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.8.391.634.368,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.074.483.907,00 atau 12,80% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.517.616.000,00	9.466.118.275,00	99,46	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00	12,80
Jumlah	9.517.616.000,00	9.466.118.275,00	99,46	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00	12,80

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.203.100.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp.218.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.203.100.000,00 atau 93,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.203.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Honorarium	218.100.000,00	203.100.000,00	93,12	-	203.100.000,00	#DIV/0!
Jumlah	218.100.000,00	203.100.000,00	93,12	-	203.100.000,00	#DIV/0!

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp.12.859.357.000,00

Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp.12.859.357.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.775.369.480,00 atau 99,35%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.12.263.624.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.511.745.454,00 atau 4,17% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Barang	1.460.227.000,00	1.416.925.835,00	97,03	932.760.905,00	484.164.930,00	51,91
2 Belanja Jasa	2.022.082.000,00	2.001.087.347,00	98,96	3.969.806.331,00	(1.968.718.984,00)	(49,59)
3 Belanja Pemeliharaan	582.855.000,00	579.801.196,00	99,48	990.346.684,00	(410.545.488,00)	(41,45)
4 Belanja Perjalanan Dinas	8.794.193.000,00	8.777.555.102,00	99,81	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00	37,78
Jumlah	12.859.357.000,00	12.775.369.480,00	99,35	12.263.624.026,00	511.745.454,00	4,17

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp.1.460.227.000,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp.1.460.227.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.416.925.835,00 atau 97,03%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.932.760.905,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.484.164.930,00 atau 51,91% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Barang Habis Pakai	1.460.227.000,00	1.416.925.835,00	97,03	932.760.905,00	484.164.930,00	51,91
	1.460.227.000,00	1.416.925.835,00	97,03	932.760.905,00	484.164.930,00	51,91

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp.2.022.082.000,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp.2.022.082.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.001.087.347,00

atau 98,96%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.3.969.806.331,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.968.718.984,00 atau 49,59% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Jasa Kantor	1.587.920.000,00	1.569.442.011,00	98,84	3.625.221.084,00	(2.055.779.073,00)	(56,71)
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	233.150.000,00	230.909.474,00	99,04	192.837.155,00	38.072.319,00	19,74
3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	-	6.200.000,00	#DIV/0!
4 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	#DIV/0!	12.018.000,00	(12.018.000,00)	(100,00)
5 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	194.812.000,00	194.535.862,00	99,86	139.730.092,00	54.805.770,00	39,22
Jumlah	2.022.082.000,00	2.001.087.347,00	98,96	3.969.806.331,00	(1.968.718.984,00)	(49,59)

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp. 582.855.000,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp.582.855.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.579.801.196,00 atau 99,48%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.990.346.684,00 mengalami penurunan sebesar Rp.410.545.488,00 atau 41,45 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	507.090.000,00	504.200.336,00	99,43	562.828.357,00	(58.628.021,00)	(10,42)
2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.765.000,00	29.610.630,00	99,48	312.207.827,00	(282.597.197,00)	(90,52)
3 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.000.000,00	45.990.230,00	99,98	115.310.500,00	(69.320.270,00)	(60,12)
Jumlah	582.855.000,00	579.801.196,00	99,48	990.346.684,00	(410.545.488,00)	(41,45)

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp.8.794.193.000,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp.8.794.193.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.777.555.102,00 atau 99,81%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.6.370.710.106,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.406.844.996,00 atau 37,78% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.794.193.000,00	8.777.555.102,00	99,81	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00	37,78
Jumlah	8.794.193.000,00	8.777.555.102,00	99,81	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00	37,78

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp.136.550.000,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.136.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.135.946.200,00 atau 99,56%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.252.839.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp.116.893.700,00 atau 46,23 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.550.000,00	135.946.200,00	99,56	250.500.000,00	(114.553.800,00)	(45,73)
2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!	2.339.900,00	(2.339.900,00)	(100,00)
Jumlah	136.550.000,00	135.946.200,00	99,56	252.839.900,00	(116.893.700,00)	(46,23)

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.136.550.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.136.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.135.946.200,00 atau 99,56%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.250.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.114.553.800,00 atau 45,73% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.350.000,00	32.746.200,00	98,19	39.800.000,00	(7.053.800,00)	(17,72)
2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	#DIV/0!	138.925.000,00	(138.925.000,00)	(100,00)
3 Belanja Modal Komputer	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	71.775.000,00	31.425.000,00	43,78
Jumlah	136.550.000,00	135.946.200,00	99,56	250.500.000,00	(114.553.800,00)	(45,73)

5.1.2.2.2 Belanja Modal Komputer Rp.103.200.000,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp.103.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.103.200.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.71.775.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.31.425.000,00 atau 43,78 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Komputer Unit	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	71.775.000,00	31.425.000,00	43,78
Jumlah	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	71.775.000,00	31.425.000,00	43,78

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp.8.493.832.244,17

Total Aset sebesar Rp.8.493.832.244,17 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.9.463.122.327,99 mengalami penurunan sebesar Rp.969.290.083,82 atau 10,24%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Aset Lancar	109.531.257,60	126.750.146,51
2 Aset Tetap	8.237.118.936,57	9.129.916.131,48
3 Aset Lainnya	147.182.050,00	206.456.050,00
Jumlah	8.493.832.244,17	9.463.122.327,99

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp.109.531.257,60

Aset Lancar sebesar Rp.109.531.257,60, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.126.750.146,51 mengalami penurunan sebesar Rp.17.218.888,91 atau 13,58% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Belanja Dibayar Dimuka	109.436.727,60	125.580.046,51
2 Persediaan	94.530,00	1.170.100,00
Jumlah	109.531.257,60	126.750.146,51

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp.109.436.727,60

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp.109.436.727,60, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.125.580.046,51 mengalami penurunan sebesar Rp.16.143.318,91 atau 12,86% dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	109.436.727,60	125.580.046,51
Jumlah	109.436.727,60	125.580.046,51

5.2.1.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka Rp.109.436.727,60

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp.109.436.727,60, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.125.580.046,51 mengalami penurunan sebesar Rp.16.143.318,91 atau 12,86% dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	109.436.727,60	125.580.046,51
Jumlah	109.436.727,60	125.580.046,51

5.2.1.1.2 Persediaan Rp.94.530,00

Persediaan sebesar Rp.94.530,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.170.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.075.570,00 atau 91,92 % dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Barang Pakai Habis	94.530,00	1.170.100,00
Jumlah	94.530,00	1.170.100,00

5.3.1.1.12.1 Barang Pakai Habis Rp.94.530,00

Barang Pakai Habis sebesar Rp.94.530,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.170.100,00 penurunan sebesar Rp.1.075.570,00 atau 91,92 % dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	94.530,00	1.170.100,00
	Jumlah	94.530,00	1.170.100,00

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang Pakai Habis pada Gudang Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2022, persediaan berupa bahan pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA JENIS/ MACAM BARANG	SATUAN	MENURUT		SELISIH (- / +)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			CATATAN	KENYATAAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	ATK						
1	Buku Kwarto garis 100 lembar	Buah	1	1	-	8.000	8.000
2	Buku Tulis Glatik	Buah	2	2	-	7.215	14.430
3	Stopmap	Buah	4	4	-	2.775	11.100
4	Stopmap Snelhecter	Buah	5	5	-	3.000	15.000
5	Ballpoint	Buah	1	1	-	20.000	20.000
6	Batu Batteray AAA	Buah	2	2	-	13.000	26.000
	Jumlah						94.530

5.2.1.2 Aset Tetap Rp. 8.237.118.936,57

Aset Tetap sebesar Rp.8.237.118.936,57, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.9.129.916.131,48 mengalami penurunan sebesar Rp.892.797.194,91 atau 9,78% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	13.275.847.124,00	13.140.784.274,00
3	Gedung dan Bangunan	13.139.885.450,00	13.139.885.450,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	23.412.900,00	23.412.900,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(18.202.026.537,43)	(17.174.166.492,52)
	Jumlah	8.237.118.936,57	9.129.916.131,48

5.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin Rp.13.275.847.124,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp.13.275.847.124,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.13.140.784.274,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.135.062.850,00 atau 1,03% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Alat Besar	208.302.000,00	208.302.000,00
2	Alat Angkutan	4.782.892.291,00	4.782.892.291,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	71.400.000,00	71.400.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.821.099.250,00	4.789.236.400,00
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	940.908.165,00	940.908.165,00

6	Alat Laboratorium	122.022.000,00	122.022.000,00
7	Alat Persenjataan	8.500.000,00	8.500.000,00
8	Komputer	2.320.723.418,00	2.217.523.418,00
	Jumlah	13.275.847.124,00	13.140.784.274,00

5.2.1.2.1.1 Alat Besar Rp.201.852.000,00

Alat Besar sebesar Rp.201.852.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.208.302.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.6.450.000,00 atau 3,10% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Alat Bantu	201.852.000,00	208.302.000,00
	Jumlah	201.852.000,00	208.302.000,00

5.2.1.2.1.2 Alat Angkutan Rp.4.782.892.291,00

Alat Angkutan sebesar Rp.4.782.892.291,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.4.782.892.291,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.782.892.291,00	4.782.892.291,00
	Jumlah	4.782.892.291,00	4.782.892.291,00

Mutasi Aset Alat Angkut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	4.782.892.291,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	4.462.409.771,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	9.425.302.062,00
Berkurang		
Ekstrakomptabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	4.462.409.771,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	4.462.409.771,00
Grand Total	Rp	4.782.892.291,00

5.2.1.2.1.3 Alat Bengkel dan Ukur Rp.71.400.000,00

Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp.71.400.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.71.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Alat Ukur	71.400.000,00	71.400.000,00
	Jumlah	71.400.000,00	71.400.000,00

5.2.1.2.1.4 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.4.827.549.250,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.4.827.549.250,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.4.789.236.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.38.312.850,00 atau 0,80% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Alat Kantor	1.709.688.308,00	1.709.688.308,00
2 Alat Rumah Tangga	2.902.565.408,00	2.893.702.058,00
3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	215.295.534,00	185.846.034,00
Jumlah	4.827.549.250,00	4.789.236.400,00

Mutasi Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	4.789.236.400,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	32.746.200,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	6.450.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	4.828.432.600,00
Berkurang		
Ekstrakomptabel	Rp	883.350,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Grand Total	Rp	4.827.549.250,00

5.2.1.2.1.5 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.940.908.165,00

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp.940.908.165,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.940.908.165,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Alat Studio	832.414.165,00	832.414.165,00
2 Alat Komunikasi	108.494.000,00	108.494.000,00
Jumlah	940.908.165,00	940.908.165,00

5.2.1.2.1.6 Alat Laboratorium Rp.122.022.000,00

Alat Laboratorium sebesar Rp.122.022.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.122.022.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Unit Alat Laboratorium	122.022.000,00	122.022.000,00
Jumlah	122.022.000,00	122.022.000,00

5.2.1.2.1.7 Alat Persenjataan Rp.8.500.000,00

Alat Persenjataan sebesar Rp.8.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.8.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Senjata Non Senjata Api	8.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah	8.500.000,00	8.500.000,00

5.2.1.2.1.8 Komputer Rp.2.320.723.418,00

Komputer sebesar Rp.2.320.723.418,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.2.217.523.418,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.103.200.000,00 atau 4,65% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Komputer Unit	1.325.145.952,00	1.221.945.952,00
2 Peralatan Komputer	995.577.466,00	995.577.466,00
Jumlah	2.320.723.418,00	2.217.523.418,00

Mutasi Aset Alat Komputer sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	2.217.523.418,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	103.200.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk Antar SKPD	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	103.200.000,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Grand Total	Rp	2.320.723.418,00

5.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan Rp.13.139.885.450,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp.13.139.885.450,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.13.139.885.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Bangunan Gedung	13.125.575.450,00	13.125.575.450,00
2 Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.310.000,00	14.310.000,00
Jumlah	13.139.885.450,00	13.139.885.450,00

5.2.1.2.2.1 Bangunan Gedung Rp.13.125.575.450,00

Bangunan Gedung sebesar Rp.13.125.575.450,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.13.125.575.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.125.575.450,00	13.125.575.450,00
Jumlah	13.125.575.450,00	13.125.575.450,00

5.2.1.2.2.2 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.14.310.000,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp.14.310.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.14.310.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Tugu/Tanda Batas	14.310.000,00	14.310.000,00
Jumlah	14.310.000,00	14.310.000,00

5.2.1.2.3 Aset Tetap Lainnya Rp.23.412.900,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.23.412.900,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.23.412.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	21.412.900,00	21.412.900,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah	23.412.900,00	23.412.900,00

5.2.1.2.3.1 Bahan Perpustakaan Rp.21.412.900,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp.21.412.900,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.21.412.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan Tercetak	21.412.900,00	21.412.900,00
Jumlah	21.412.900,00	21.412.900,00

5.2.1.2.3.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp.2.000.000,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp.2.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Barang Bercorak Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00
2 Alat Bercorak Kebudayaan	-	-
3 Tanda Penghargaan	-	-
Jumlah	2.000.000,00	2.000.000,00

5.2.1.2.4 Akumulasi Penyusutan Rp.18.202.026.537,43

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.18.202.026.537,43, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.17.174.166.492,52 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.027.860.044,91 atau 5,98% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.733.332.669,86)	(11.053.539.024,03)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.468.693.867,57)	(6.120.627.468,49)
Jumlah	(18.202.026.537,43)	(17.174.166.492,52)

5.2.1.2.4.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp.11.733.332.669,86

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.11.733.332.669,86, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.11.053.539.024,03 mengalami kenaikan sebesar Rp.679.793.645,83 atau 6,15% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(168.726.375,00)	(170.268.875,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(3.870.646.041,00)	(3.578.538.666,01)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(71.400.000,00)	(71.400.000,00)
4 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(4.511.764.995,03)	(4.247.931.025,03)
5 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(889.781.290,00)	(829.011.290,00)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(113.172.000,00)	(104.322.000,00)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
8 Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.099.341.968,83)	(2.043.567.167,99)
Jumlah	(11.733.332.669,86)	(11.053.539.024,03)

5.2.1.2.4.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Rp.168.726.375,00

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar Rp.168.726.375,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.170.268.875,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.542.500,00 atau 0,91% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(93.456.000,00)	(93.456.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(75.270.375,00)	(76.812.875,00)
Jumlah	(168.726.375,00)	(170.268.875,00)

5.2.1.2.4.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Rp.3.870.646.041,00

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp.3.870.646.041,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.3.578.538.666,01 mengalami kenaikan sebesar Rp.292.107.374,99 atau 8,16% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(163.125.000,00)	(3.445.761.021,01)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(3.567.038.521,00)	-
3 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(140.482.520,00)	(132.777.645,00)
Jumlah	(3.870.646.041,00)	(3.578.538.666,01)

5.2.1.2.4.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur Rp.71.400.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp.71.400.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.71.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(36.000.000,00)	(36.000.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(35.400.000,00)	(35.400.000,00)
Jumlah	(71.400.000,00)	(71.400.000,00)

5.2.1.2.4.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.4.511.764.995,03

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.4.511.764.995,03, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.4.247.931.025,03 mengalami kenaikan sebesar Rp.263.833.970,00 atau 6,21% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(53.777.000,00)	(45.027.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(26.175.000,00)	(23.200.000,00)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(160.249.787,00)	(155.449.787,00)
4 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	(821.359.167,00)	(781.231.167,00)
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(552.851.062,33)	(500.644.312,33)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair	(873.353.405,70)	(808.731.405,70)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(14.800.000,00)	(11.840.000,00)
8 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.004.625.049,00)	(970.200.049,00)
9 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(692.521.715,00)	(660.481.270,00)
10 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(155.575.000,00)	(155.575.000,00)
11 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(49.305.517,00)	(49.305.517,00)
12 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(1.741.775,00)	-
13 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(23.100.517,00)	(23.100.517,00)
14 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(2.420.000,00)	-
15 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(5.850.000,00)	(5.850.000,00)
16 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(74.060.000,00)	(57.295.000,00)
Jumlah	(4.511.764.995,03)	(4.247.931.025,03)

5.2.1.2.4.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar Rp.889.781.290,00

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp.889.781.290,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.829.011.290,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.60.770.000,00 atau 7,33% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(709.536.673,33)	(656.379.173,33)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(71.750.616,67)	(64.725.616,67)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(108.494.000,00)	(107.906.500,00)
Jumlah	(889.781.290,00)	(829.011.290,00)

5.2.1.2.4.1.6 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Rp.113.172.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar Rp.113.172.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.104.322.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.850.000,00 atau 8,48% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(113.172.000,00)	(104.322.000,00)
Jumlah		(113.172.000,00)	(104.322.000,00)

5.2.1.2.4.1.7 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan Rp.8.500.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan sebesar Rp.8.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.8.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Senjata Non Senjata Api-Alat Keamanan	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
Jumlah		(8.500.000,00)	(8.500.000,00)

5.2.1.2.4.1.8 Akumulasi Penyusutan Komputer Rp.2.099.341.968,83

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp.2.099.341.968,83, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.2.043.567.167,99 mengalami kenaikan sebesar Rp.55.774.800,84 atau 2,73% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(7.011.000,00)	(7.011.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.179.361.402,83)	(1.070.358.076,99)
3	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(20.976.000,00)	(104.224.700,00)
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(117.162.500,00)	(117.162.500,00)
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(743.951.066,00)	(713.930.891,00)
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(30.880.000,00)	(30.880.000,00)
Jumlah		(2.099.341.968,83)	(2.043.567.167,99)

5.2.1.2.4.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp.6.468.693.867,57

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.6.468.693.867,57, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.6.120.627.468,49 mengalami kenaikan sebesar Rp.347.780.199,08 atau 5,68% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.465.545.667,57)	(6.117.765.468,49)
2	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(3.148.200,00)	(2.862.000,00)
Jumlah		(6.468.693.867,57)	(6.120.627.468,49)

5.2.1.2.4.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Rp.6.465.545.667,57

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp.6.465.545.667,57, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.6.117.765.468,49 mengalami kenaikan sebesar Rp.347.780.199,08 atau 5,68% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(6.035.608.667,57)	(5.703.381.468,49)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(429.937.000,00)	(414.384.000,00)
	Jumlah	(6.465.545.667,57)	(6.117.765.468,49)

5.2.1.2.4.2.2 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.3.148.200,00

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp.3.148.200,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.2.862.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.286.200,00 atau 10% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	(3.148.200,00)	(2.862.000,00)
	Jumlah	(3.148.200,00)	(2.862.000,00)

5.2.1.3 Aset Lainnya Rp.147.182.050,00

Aset Lainnya sebesar Rp.147.182.050,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.206.456.050,00 mengalami penurunan sebesar Rp.59.274.000,00 atau 28,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	311.165.000,00	311.165.000,00
2	Aset Lain-lain	111.319.915,00	111.319.915,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(192.617.000,00)	(133.343.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(82.685.865,00)	(82.685.865,00)
	Jumlah	147.182.050,00	206.456.050,00

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud Rp.311.165.000,00

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.311.165.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.311.165.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Software	311.165.000,00	311.165.000,00
	Jumlah	311.165.000,00	311.165.000,00

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain Rp.111.319.915,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp.111.319.915,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.111.319.915,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	111.319.915,00	111.319.915,00
	Jumlah	111.319.915,00	111.319.915,00

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp.192.617.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.192.617.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.133.343.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.59.274.000,00 atau 44,45% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(192.617.000,00)	(133.343.000,00)
Jumlah	(192.617.000,00)	(133.343.000,00)

5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp.82.685.865,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp.82.685.865,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.82.685.865,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(82.685.865,00)	(82.685.865,00)
Jumlah	(82.685.865,00)	(82.685.865,00)

5.2.2 KEWAJIBAN Rp,00

Total Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,-.

5.2.3 EKUITAS Rp.8.426.570.180,27

Total Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.8.494.147.184,45 turun sebesar Rp.968.975.143,54 atau 10,24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.463.122.327,99.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-
2 Beban	31.750.687.759,00	1.313.953.981,42	109.531.257,60	32.955.110.482,82	30.809.929.161,92	2.145.181.320,90	6,96
Surplus/(Defisit) Operasional Kegiatan Non Operasional	(31.750.687.759,00)	(1.313.953.981,42)	(109.531.257,60)	(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)	(2.145.181.320,90)	6,96
3 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(31.750.687.759,00)	(1.313.953.981,42)	(109.531.257,60)	(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)	(2.145.181.320,90)	6,96
4 Pos Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(31.750.687.759,00)	(1.313.953.981,42)	(109.531.257,60)	(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)	(2.145.181.320,90)	6,96

Penjelasan lebih lanjut mengenai LO Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut:

5.3.1 BEBAN DAERAH Rp.32.955.110.482,82

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp.32.955.110.482,82, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.30.809.929.161,92 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.145.181.320,90 atau 6,96% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Operasional	31.750.687.759,00	1.313.953.981,42	109.531.257,60	32.955.110.482,82	30.809.929.161,92	2.145.181.320,90	6,96
Jumlah	31.750.687.759,00	1.313.953.981,42	109.531.257,60	32.955.110.482,82	30.809.929.161,92	2.145.181.320,90	6,96

5.3.1.1 BEBAN OPERASIONAL Rp.32.955.110.482,82

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp.32.955.110.482,82, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.30.809.929.161,92 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.145.181.320,90 atau 6,96% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pegawai	18.975.318.279,00	-	-	18.975.318.279,00	17.275.812.067,00	1.699.506.212,00	9,84
2 Beban Barang dan Jasa	12.775.369.480,00	126.750.146,51	109.531.257,60	12.792.588.368,91	12.213.838.195,82	578.750.173,09	4,74
3 Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.186.320.484,91	-	1.186.320.484,91	1.319.403.899,10	(133.083.414,19)	(10,09)
4 Beban Lain-Lain	-	883.350,00	-	883.350,00	875.000,00	8.350,00	0,95
Jumlah	31.750.687.759,00	1.313.953.981,42	109.531.257,60	32.955.110.482,82	30.809.929.161,92	2.145.181.320,90	6,96

5.3.1.1.1 Beban Pegawai Rp.18.975.318.279,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp.18.975.318.279,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.17.275.812.067,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.699.506.212,00 atau 9,84% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.306.100.004,00	-	-	9.306.100.004,00	8.884.177.699,00	421.922.305,00	4,75
2 Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.466.118.275,00	-	-	9.466.118.275,00	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00	12,80
3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	203.100.000,00	-	-	203.100.000,00	-	203.100.000,00	-
Jumlah	18.975.318.279,00	-	-	18.975.318.279,00	17.275.812.067,00	1.699.506.212,00	9,84

5.3.1.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp.9.292.573.113,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp.9.292.573.113,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.8.884.177.699,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.408.395.414,00 atau 4,60% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji Pokok ASN	6.586.197.880,00	-	-	6.586.197.880,00	6.324.410.050,00	261.787.830,00	4,14
2 Beban Tunjangan Keluarga ASN	616.600.180,00	-	-	616.600.180,00	618.228.744,00	(1.628.564,00)	(0,26)
3 Beban Tunjangan Jabatan ASN	106.560.000,00	-	-	106.560.000,00	107.790.000,00	(1.230.000,00)	(1,14)

4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	789.230.000,00	-	-	789.230.000,00	697.690.000,00	91.540.000,00	13,12
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	140.840.000,00	-	-	140.840.000,00	118.240.000,00	22.600.000,00	19,11
6	Beban Tunjangan Beras ASN	371.804.280,00	-	-	371.804.280,00	350.440.380,00	21.363.900,00	6,10
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	50.516.347,00	-	-	50.516.347,00	49.762.642,00	753.705,00	1,51
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	95.334,00	-	-	95.334,00	81.017,00	14.317,00	17,67
9	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	590.148.419,00	-	-	590.148.419,00	565.440.074,00	24.708.345,00	4,37
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.526.891,00	-	-		13.030.140,00	(13.030.140,00)	(100,00)
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	40.580.673,00	-	-	40.580.673,00	39.064.652,00	1.516.021,00	3,88
	Jumlah	9.306.100.004,00	-	-	9.292.573.113,00	8.884.177.699,00	408.395.414,00	4,60

5.3.1.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp.9.466.118.275,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp.9.466.118.275,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.8.391.634.368,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.074.483.907,00 atau 12,80% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.466.118.275,00	-	-	9.466.118.275,00	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00	12,80
	Jumlah	9.466.118.275,00	-	-	9.466.118.275,00	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00	12,80

5.3.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.203.100.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp.203.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Honorarium	203.100.000,00	-	-	203.100.000,00	-	203.100.000,00	-
	Jumlah	203.100.000,00	-	-	203.100.000,00	-	203.100.000,00	-

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp.12.792.588.368,91

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.12.792.588.368,91, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.12.213.838.195,82 mengalami kenaikan sebesar Rp.578.750.173,09 atau 4,74% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Barang	1.416.925.835,00	1.170.100,00	94.530,00	1.418.001.405,00	935.001.905,00	482.999.500,00	51,66
2 Beban Jasa	2.001.087.347,00	125.580.046,51	109.436.727,60	2.017.230.665,91	3.957.039.500,82	(1.939.808.834,91)	(49,02)
3 Beban Pemeliharaan	579.801.196,00	-	-	579.801.196,00	951.086.684,00	(371.285.488,00)	(39,04)
4 Beban Perjalanan Dinas	8.777.555.102,00	-	-	8.777.555.102,00	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00	37,78
Jumlah	12.775.369.480,00	126.750.146,51	109.531.257,60	12.792.588.368,91	12.213.838.195,82	578.750.173,09	4,74

5.3.1.1.2.1 Beban Barang Rp.1.418.001.405,00

Beban Barang terealisasi sebesar Rp1.418.001.405,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.935.001.405,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.482.999.500,00 atau 51,66% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Barang Pakai Habis	1.416.925.835,00	1.170.100,00	94.530,00	1.418.001.405,00	935.001.905,00	482.999.500,00	51,66
Jumlah	1.416.925.835,00	1.170.100,00	94.530,00	1.418.001.405,00	935.001.905,00	482.999.500,00	51,66

5.3.1.1.2.2 Beban Jasa Rp.2.017.230.665,91

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp.2.017.230.665,91, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.3.957.039.039.500,82 mengalami penurunan sebesar Rp.1.939.808.834,91 atau 49,02% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Jasa Kantor	1.569.442.011,00	-	-	1.569.442.011,00	3.625.221.084,00	(2.055.779.073,00)	(56,71)
2 Beban Jasa Asuransi	230.909.474,00	125.580.046,51	109.436.727,60	247.052.792,91	180.070.324,82	66.982.468,09	37,20
3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-
4 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	12.018.000,00	(12.018.000,00)	(100,00)
5 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	194.535.862,00	-	-	194.535.862,00	139.730.092,00	54.805.770,00	39,22
Jumlah	2.001.087.347,00	125.580.046,51	109.436.727,60	2.017.230.665,91	3.957.039.500,82	(1.939.808.834,91)	(49,02)

Total Belanja Jasa : Rp.2.001.087.347,00

Penambahan

➤ Belanja Dibayar Di Muka Awal : Rp.125.580.046,51

➤ Utang Jasa Akhir :

➤ Hibah Jasa :

Total Penambahan : Rp.125.580.046,51

Pengurangan

➤ Belanja Dibayar Di Muka Akhir	: Rp.109.436.727,60
➤ Utang Jasa Awal	:
➤ Koreksi Beban Jasa	:
➤ Reklas ke Belanja Lain	:
Total Pengurangan	: Rp.109.436.727,60
Total Beban Jasa	: Rp.2.017.230.665,91

5.3.1.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp.579.801.196,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp.579.801.196,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.951.086.684,00 mengalami penurunan sebesar Rp.371.285.488,00 atau 39,04% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	504.200.336,00	-	-	504.200.336,00	562.828.357,00	(58.628.021,00)	(10,42)
2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.610.630,00	-	-	29.610.630,00	272.947.827,00	(243.337.197,00)	(89,15)
3 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.990.230,00	-	-	45.990.230,00	115.310.500,00	(69.320.270,00)	(60,12)
Jumlah	579.801.196,00	-	-	579.801.196,00	951.086.684,00	(371.285.488,00)	(39,04)

5.3.1.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp.8.777.555.102,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp.8.777.555.102,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.6.370.710.106,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.406.844.996,00 atau 37,78% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.777.555.102,00	-	-	8.777.555.102,00	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00	37,78
Jumlah	8.777.555.102,00	-	-	8.777.555.102,00	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00	37,78

5.3.1.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp.1.186.320.484,91

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp.1.186.320.484,91, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.1.319.403.899,10 mengalami penurunan sebesar Rp.133.083.414,19 atau 10,09% dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	778.980.085,83	912.063.500,03	(133.083.414,20)	(14,59)
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	348.066.399,08	348.066.399,07	0,01	0,00
3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	59.274.000,00	59.274.000,00	-	-
Jumlah	1.186.320.484,91	1.319.403.899,10	(133.083.414,19)	(10,09)

5.3.1.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp.778.980.085,83

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp.778.980.085,83, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.912.063.500,03 mengalami penurunan sebesar Rp.133.083.414,19 atau 14,59% dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Besar	4.907.500,00	1.226.875,00	3.680.625,00	300,00
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan	292.107.374,99	344.444.875,01	(52.337.500,02)	(15,19)
3 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	257.383.970,00	317.993.625,03	(60.609.655,03)	(19,06)
4 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	60.770.000,00	94.805.625,00	(34.035.625,00)	(35,90)
5 Beban Penyusutan Alat Laboratorium	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-
6 Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	2.125.000,00	(2.125.000,00)	(100,00)
7 Beban Penyusutan Komputer	154.961.240,84	142.617.499,99	12.343.740,85	8,66
Jumlah	778.980.085,83	912.063.500,03	(133.083.414,20)	(14,59)

5.3.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp.348.066.399,08

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp.348.066.399,08, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.348.066.399,08 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung	347.780.199,08	347.780.199,07	0,01	0,00
2 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	286.200,00	286.200,00	-	-
Jumlah	348.066.399,08	348.066.399,07	0,01	0,00

5.3.1.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp.59.274.000,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp.59.274.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tetap sebesar Rp.59.274.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	59.274.000,00	59.274.000,00	-	-
Jumlah	59.274.000,00	59.274.000,00	-	-

5.3.1.3 Beban Lain-Lain Rp.883.350,00

Beban Lain-Lain terealisasi sebesar Rp.883.350,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.875.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.350,00 atau 0,95% dengan rincian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Lain-Lain	883.350,00	875.000,00	8.350,00	0,95
Jumlah	883.350,00	875.000,00	8.350,00	0,95

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	9.463.122.327,99	10.480.775.496,95	(1.017.653.168,96)	(9,71)
2	Surplus/Defisit-LO	(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)	(2.145.181.320,90)	6,96

3	RK-PPKD	31.886.633.959,00	29.792.275.993,00	2.094.357.966,00	0,00
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	99.186.440,00	(0,04)	99.186.440,04	(247.966.336.579,13)
	Ekuitas Akhir	8.493.832.244,17	9.463.122.327,99	(969.290.083,82)	(10,24)

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp.10.480.775.496,95 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Defisit – LO sebesar Rp.32.955.110.482,82 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada tahun 2022.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp.99.186.440,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	577.548.835,00	(577.548.835,00)	(100,00)
2	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	99.186.440,00	(577.548.835,04)	676.735.275,04	(117,17)
	Jumlah	99.186.440,00	(0,04)	99.186.440,04	(247.966.336.579,13)

5.4.3.1. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	577.548.835,00	(577.548.835,00)	(100,00)
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	99.186.440,00	-	99.186.440,00	-
3	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	(99.186.440,00)	-	(99.186.440,00)	-
	Jumlah	-	577.548.835,00	(577.548.835,00)	(100,00)

5.4.3.2. Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp.99.186.440,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	(577.548.835,04)	577.548.835,04	(100,00)
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	99.186.440,00	-	99.186.440,00	-
	Jumlah	99.186.440,00	(577.548.835,04)	676.735.275,04	(117,17)

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp.8.493.832.244,17 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	8.493.832.244,17	9.463.122.327,99	(969.290.083,82)	(10,24)
	Jumlah	8.493.832.244,17	9.463.122.327,99	(969.290.083,82)	(10,24)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 6

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Struktural	7
Fungsional Auditor	49
Fungsional P2UPD	20
Fungsional Umum	64
Jumlah	140

Sumber: Data Kepegawain Inspektorat Provinsi Jawa Tengah per Januari 2023

6.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

6.2.1. Tujuan

Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus terhadap area Penguatan Pengawasan dari 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi yang ada.

Selanjutnya selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, diharapkan dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: **“Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”**. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.

6.2.2. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP;
2. Tercapainya Nilai 3,19 Maturitas SPIP.

6.3. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasionalnya

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 7

PENUTUP

BAB 7 PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0018086/2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Auditor Ahli Madya



DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002



LAMPIRAN

LAMPIRAN

REKAP ASET

- **Mutasi Aset Tetap**
- **Mutasi Aset Lainnya**
- **Mutasi Aset Tak Berwujud**
- **Mutasi Aset Ekstrakomptabel**



MUTASI ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2022
Periode s/d Bulan DESEMBER 2022

Kode Lokasi : 060101
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : INSPEKTORAT

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2022		PENAMBAHAN						PELEPASAN						SALDO AKHIR Periode 2022.12					
		Jml.	Harga	Jml.	REKLASIFIKASI			Jml.	Jumlah Tambah	REKLASIFIKASI			Jml.	Koreksi Thn Lalu	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga			
					Belanja Modal	Dari Aset Tetap	Koreksi			Jml.	Ke Aset Tetap	Jml.							Ke Aset Ekstrakomptabel		
																				BMD	BMH
62	1.3.2.01.03.04 ELECTRIC GENERATING SET	1	93.456.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93.456.000			
63	1.3.2.01.03.05 POMPA	6	114.846.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	114.846.000			
75	1.3.2.02.01.01 KENDARAAN DINAS BERMOTOR	23	4.542.409.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4.542.409.771			
76	1.3.2.02.01.02 KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	-	-	-	1	435.000.000	-	1	435.000.000	-	-	-	-	-	-	1	435.000.000			
78	1.3.2.02.01.04 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	11	140.482.520	-	-	22	4.207.409.771	-	22	4.207.409.771	-	-	-	-	-	-	22	4.207.409.771			
122	1.3.2.03.03.01 ALAT UKUR UNIVERSAL	12	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	36.000.000			
130	1.3.2.03.03.09 ALAT UKUR LAIN-LAIN	12	35.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	35.400.000			
153	1.3.2.05.01.01 MESIN KETIK	16	53.777.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	53.777.000			
154	1.3.2.05.01.02 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	3	26.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26.175.000			
155	1.3.2.05.01.03 ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	4	160.249.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	160.249.787			
156	1.3.2.05.01.04 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN	167	831.095.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	831.095.167			
157	1.3.2.05.01.05 ALAT KANTOR LAINNYA	47	638.391.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	638.391.354			
158	1.3.2.05.02.01 MEUBELAIR	540	940.540.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	940.540.739			
160	1.3.2.05.02.03 ALAT PEMBERSIH	1	14.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.800.000			
161	1.3.2.05.02.04 ALAT PENDINGIN	123	1.053.375.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	1.053.375.049			
163	1.3.2.05.02.06 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	76	729.411.270	3	3.296.700	2	6.450.000	-	5	9.746.700	-	-	2	883.350	-	2	883.350	79	738.274.620		
164	1.3.2.05.02.07 ALAT PEMADAM KEBAKARAN	4	155.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	155.575.000			
165	1.3.2.05.03.01 MEJA KERJA PEJABAT	15	49.305.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	49.305.517			
166	1.3.2.05.03.02 MEJA RAPAT PEJABAT	-	-	10	14.929.500	-	-	-	10	14.929.500	-	-	-	-	-	-	10	14.929.500			
167	1.3.2.05.03.03 KURSI KERJA PEJABAT	15	23.100.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	23.100.517			
168	1.3.2.05.03.04 KURSI RAPAT PEJABAT	-	-	10	14.520.000	-	-	-	10	14.520.000	-	-	-	-	-	-	10	14.520.000			
169	1.3.2.05.03.05 KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA	3	5.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.850.000			
171	1.3.2.05.03.07 LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	8	107.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	107.590.000			
172	1.3.2.06.01.01 PERALATAN STUDIO AUDIO	37	736.661.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	736.661.465			
173	1.3.2.06.01.02 PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	13	95.752.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	95.752.700			
178	1.3.2.06.02.01 ALAT KOMUNIKAS TELEPHONE	14	108.494.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	108.494.000			
286	1.3.2.08.01.06 ALAT LABORATORIUM BAHAN	14	122.022.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	122.022.000			
433	1.3.2.09.02.01 ALAT KEAMANAN	1	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.500.000			
450	1.3.2.10.01.01 KOMPUTER JARINGAN	1	7.011.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.011.000			
451	1.3.2.10.01.02 PERSONAL KOMPUTER	111	1.214.994.952	7	105.200.000	-	-	93.608.140	7	196.808.140	-	-	-	10	15.937.740	10	15.937.740	108	1.395.805.352		
453	1.3.2.10.02.01 PERALATAN MAINFRAME	41	104.224.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	85.248.700	39	85.248.700	2	20.976.000		
454	1.3.2.10.02.02 PERALATAN MINI KOMPUTER	18	117.162.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	117.162.500			
455	1.3.2.10.02.03 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	173	743.310.266	-	-	-	-	5.578.300	-	5.578.300	-	-	-	-	-	-	173	748.888.566			
456	1.3.2.10.02.04 PERALATAN JARINGAN	2	30.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30.880.000			
557	1.3.3.01.01.01 BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1	12.347.925.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.347.925.450			
558	1.3.3.01.01.02 BANGUNAN GUDANG	2	777.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	777.650.000			
621	1.3.3.04.01.01 TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	1	14.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.310.000			
764	1.3.5.01.01.01 BUKU UMUM	209	21.412.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209	21.412.900			
793	1.3.5.02.01.03 ALAT PERAGA KESENIAN	1	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000			
		1.726	26.304.082.624	30	135.946.200	-	25	4.648.859.771	99.186.440	55	4.883.992.411	25	4.648.859.771	2	883.350	49	95.186.440	76	4.748.929.361	1.705	26.433.145.474



Pengurus Barang

M ISA THORIG A.S.Mum
Penata Muda Tk I
NIP. 19880720201001011

1	2	3	4	5	12	13	28	29	30	31
13	1.5.4.01.01.03.003	Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.5.4.01.01.03.004	Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.5.4.01.01.03.005	Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.5.4.01.01.03.006	Aset Lain-lain Aset Tak Berwujud	3,00	82.685.865,00	-	-	-	-	3,00	82.685.865,00
			2.791	111.319.915	-	-	-	-	2.791	111.319.915

Mengetahui,
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Matya



DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731015-199703 1 002

Semarang, 31 Desember 2022

Pengurus Barang

M. ISA THORIQ AMRULLAH, S.Hum.
NIP. 19880720201101 1 011



MUTASI ASET TAK BERWUJUD

PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun 2022

Periode s/d Bulan DESEMBER 2022

Kode Lokasi : 060101.00000.00000
Bidang : INSPEKTORAT
Sub Bidang : INSPEKTORAT
Satuan Kerja : INSPEKTORAT

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2022		PENAMBAHAN		PELEPASAN	SALDO AKHIR TAHUN	
		Jml.	Harga	Jml.	Jumlah Tambah	Jumlah Pelepasan	Jml.	Harga
1	2	3		12		18	19	
1	1.5.3.01.01.01	GOODWILL	-	-	-	-	-	-
2	1.5.3.01.01.02	LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-	-	-
3	1.5.3.01.01.03	HAK CIPTA	-	-	-	-	-	-
4	1.5.3.01.01.04	HAK PATEN	-	-	-	-	-	-
5	1.5.3.01.01.05	SOFTWARE	4	311.165.000,00	-	-	4	311.165.000,00
6	1.5.3.01.01.06	KAJIAN	-	-	-	-	-	-
7	1.5.3.01.01.07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA	-	-	-	-	-	-
8	1.5.3.01.01.08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
9	1.5.3.01.01.09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	-	-	-	-	-	-
			4	311.165.000,00	-	-	4	311.165.000,00

Mengetahui,
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya

DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 197310151997031002



Semarang, 31 Desember 2022

Pengurus Barang

M. ISA THORIQ AMRULLAH, S.Hum.
NIP. 198807202011011011

1	2	3	8	11	17	18					
21	1.3.3.02	MONUMEN	-	-	-	-					
22	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-					
23	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-					
24	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-					
25	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-	-	-	-					
26	1.3.4.03	INSTALASI	-	-	-	-					
27	1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-					
28	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-					
29	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLA H RAGA	-	-	-	-					
30	1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-					
31	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-					
32	1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-					
33	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-					
34	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-					
		890,00	128.323.759,00	2,00	883.350,00	2,00	883.350,00	-	-	892,00	129.207.109,00

Mengetahui,
Pit. Inspektur Provinsi Jawa Tengah



Semarang, 31 Desember 2022

Pengurus Barang

M. ISA THORIQ AMRULLAH, S.Hum.
NIP. 19880720201101 1 011

LAMPIRAN

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

- **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**
- **Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**
- **Amortisasi Aset Tak Berwujud**



AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2022

PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : 060101
 Bidang : INSPEKTORAT
 Sub Bidang : INSPEKTORAT
 Satuan Kerja : INSPEKTORAT

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumusi Awal	TAMBAH		KURANG		Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
			Jml	Harga		Reklas	Reklas	KOREKSI				
						Dari Aset Tetap	Ke Aset Tetap					
1	2	3	4	5	6	9	14	17	18	19	20	
22	1.3.7.01.01.03.004	Akumulasi Penyusutan Electric Genetaring Set	1	93.456.000,00	93.456.000,00	-	-	-	-	93.456.000,00	-	
23	1.3.7.01.01.03.005	Akumulasi Penyusutan Pompa	4	108.396.000,00	76.812.875,00	-	6.450.000,00	-	4.907.500,00	75.270.375,00	33.125.625,00	
35	1.3.7.01.02.01.001	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	435.000.000,00	3.445.761.021,01	135.937.500,00	3.587.962.271,00	-	169.388.749,99	163.125.000,00	271.875.000,00	
36	1.3.7.01.02.01.002	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	22	4.207.409.771,00	-	3.452.024.771,00	-	-	115.013.750,00	3.567.038.521,00	640.371.250,00	
38	1.3.7.01.02.01.004	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11	140.482.520,00	132.777.645,00	-	-	-	7.704.875,00	140.482.520,00	-	
82	1.3.7.01.03.03.001	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Universal	12	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	-	-	36.000.000,00	-	
90	1.3.7.01.03.03.009	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Lain- Lain	12	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-	-	-	35.400.000,00	-	
113	1.3.7.01.05.01.001	Akumulasi Penyusutan Mesin Ketik	16	53.777.000,00	45.027.000,00	-	-	-	8.750.000,00	53.777.000,00	-	
114	1.3.7.01.05.01.002	Akumulasi Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3	26.175.000,00	23.200.000,00	-	-	-	2.975.000,00	26.175.000,00	-	
115	1.3.7.01.05.01.003	Akumulasi Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	4	160.249.787,00	155.449.787,00	-	-	-	4.800.000,00	160.249.787,00	-	
116	1.3.7.01.05.01.004	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	167	831.095.167,00	781.231.167,00	-	-	-	40.128.000,00	821.359.167,00	9.736.000,00	
117	1.3.7.01.05.01.005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya	47	638.391.354,00	500.644.312,33	-	-	-	52.208.750,00	552.851.062,33	85.540.291,67	
118	1.3.7.01.05.02.001	Akumulasi Penyusutan Meubelair	540	940.540.739,00	808.731.405,70	-	-	-	64.622.000,00	873.353.405,70	67.187.333,30	
120	1.3.7.01.05.02.003	Akumulasi Penyusutan Alat Pembersih	1	14.800.000,00	11.840.000,00	-	-	-	2.960.000,00	14.800.000,00	-	
121	1.3.7.01.05.02.004	Akumulasi Penyusutan Alat Pendingin	123	1.053.375.049,00	970.200.049,00	-	-	-	34.425.000,00	1.004.625.049,00	48.750.000,00	
123	1.3.7.01.05.02.006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	79	738.274.620,00	660.481.270,00	6.450.000,00	-	-	25.590.445,00	692.521.715,00	45.752.905,00	
124	1.3.7.01.05.02.007	Akumulasi Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	4	155.575.000,00	155.575.000,00	-	-	-	-	155.575.000,00	-	
125	1.3.7.01.05.03.001	Akumulasi Penyusutan Meja Kerja Pejabat	15	49.305.517,00	49.305.517,00	-	-	-	-	49.305.517,00	-	
126	1.3.7.01.05.03.002	Akumulasi Penyusutan Meja Rapat Pejabat	10	14.929.500,00	-	-	-	-	1.741.775,00	1.741.775,00	13.187.725,00	
127	1.3.7.01.05.03.003	Akumulasi Kursi Kerja Pejabat	15	23.100.517,00	23.100.517,00	-	-	-	-	23.100.517,00	-	
128	1.3.7.01.05.03.004	Akumulasi Kursi Rapat Pejabat	10	14.520.000,00	-	-	-	-	2.420.000,00	2.420.000,00	12.100.000,00	
129	1.3.7.01.05.03.005	Akumulasi Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	3	5.850.000,00	5.850.000,00	-	-	-	-	5.850.000,00	-	
131	1.3.7.01.05.03.007	Akumulasi Lemari dan Arsip Pejabat	8	107.590.000,00	57.295.000,00	-	-	-	16.765.000,00	74.060.000,00	33.530.000,00	
132	1.3.7.01.06.01.001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Studio Audio	37	738.661.465,00	656.379.173,33	-	-	-	53.157.500,00	709.536.673,33	27.124.791,67	
133	1.3.7.01.06.01.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan studioVideo dan Film	13	95.752.700,00	64.725.616,67	-	-	-	7.025.000,00	71.750.616,67	24.002.083,33	
136	1.3.7.01.06.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	14	108.494.000,00	107.906.500,00	-	-	-	587.500,00	108.494.000,00	-	
246	1.3.7.01.08.01.006	Akumulasi Penyusutan Alat Konstruksi	14	122.022.000,00	104.322.000,00	-	-	-	8.850.000,00	113.172.000,00	8.850.000,00	
393	1.3.7.01.09.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	1	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	-	-	8.500.000,00	-	
410	1.3.7.01.10.01.001	Akumulasi Penyusutan Komputer Jaringan	1	7.011.000,00	7.011.000,00	-	-	-	-	7.011.000,00	-	
411	1.3.7.01.10.01.002	Akumulasi Penyusutan Personal Komputer	108	1.395.805.352,00	1.070.356.076,99	-	-	15.937.740,00	124.941.065,84	1.179.361.402,83	-	
413	1.3.7.01.10.02.001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mainframe	2	20.976.000,00	104.224.700,00	-	-	83.248.700,00	-	20.976.000,00	-	
414	1.3.7.01.10.02.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mini Komputer	18	117.162.500,00	117.162.500,00	-	-	-	-	117.162.500,00	-	
415	1.3.7.01.10.02.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Personal Komputer	173	748.888.566,00	713.930.891,00	-	-	-	30.020.175,00	743.951.066,00	4.937.500,00	
416	1.3.7.01.10.02.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan	2	30.880.000,00	30.880.000,00	-	-	-	-	30.880.000,00	-	

516	1.3.7.02.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	1	12.347.925.450,00	5.703.381.468,49	-	-	-	332.227.199,06	6.035.608.867,57	6.312.316.782,43
517	1.3.7.02.01.01.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang	2	777.650.000,00	414.384.000,00	-	-	-	15.553.000,00	429.937.000,00	347.713.000,00
560	1.3.7.02.04.01.001	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	1	14.310.000,00	2.682.000,00	-	-	-	286.200,00	3.148.200,00	11.161.800,00
			1.495	26.415.732.574,00	17.174.166.492,52	3.594.412.271,00	3.594.412.271,00	99.186.440,00	1.127.046.484,91	18.202.026.537,43	7.997.262.087,40



Pengurus Barang

(Handwritten Signature)
M ISA THORIQ A.S. Hum
 Penata Muda Tk I
 NIP. 196807202011011011



AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2022
Periode s/d Bulan DESEMBER 2022

Kode Lokasi : 060101.00000.00000
Bidang : INSPEKTORAT
Sub Bidang : INSPEKTORAT
Satuan Kerja : INSPEKTORAT

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	1.5.6.01.01.02.001 Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	2,788	28.634.050,00	-	-	-	28.634.050,00
2	1.5.6.01.01.02.002 Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak	-	-	-	-	-	-
3	1.5.6.01.01.02.003 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	3	82.685.865,00	82.685.865,00	-	82.685.865,00	-
Jumlah		2.791	111.319.915,00	82.685.865,00	-	82.685.865,00	28.634.050,00

Mengetahui,
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya



DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 197310151997031002

Semarang, 31 Desember 2022

Pengurus Barang

M. ISA THORIC AMPULLAH, S.Hum.
NIP. 198807202011011011



AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2022
Periode s/d Bulan DESEMBER 2022

Kode Lokasi : 060101.00000.00000
Bidang : INSPEKTORAT
Sub Bidang : INSPEKTORAT
Satuan Kerja : INSPEKTORAT

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	1.5.5.01.01.01.001 Akumulasi Amortisasi Goodwill	-	-	-	-	-	-
2	1.5.5.01.01.01.002 Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-	-	-
3	1.5.5.01.01.01.003 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	-	-	-	-	-	-
4	1.5.5.01.01.01.004 Akumulasi Amortisasi Hak Paten	-	-	-	-	-	-
5	1.5.5.01.01.01.005 Akumulasi Amortisasi Software	4	311.165.000,00	133.343.000,00	59.274.000,00	192.617.000,00	118.548.000,00
6	1.5.5.01.01.01.006 Akumulasi Amortisasi Kajian	-	-	-	-	-	-
7	1.5.5.01.01.01.007 Akumulasi Amortisasi Yang Mempunyai Nilai	-	-	-	-	-	-
8	1.5.5.01.01.01.008 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4	311.165.000,00	133.343.000,00	59.274.000,00	192.617.000,00	118.548.000,00

Mengetahui,
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Auditor Ahli Madya

DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731015 199703 1 002



Semarang, 31 Desember 2022

Pengurus Barang

M. ISA THORIQ AMRULLAH, S.Hum.
NIP. 19880720 201101 1 011

LAMPIRAN

BERITA ACARA REKONSILIASI

- **Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja APBD Tahun Anggaran 2022**
- **Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2022**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 35/BA-RKN/SKPD/I/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **LAKSONO DEWANTO, SE, MM**

NIP : 19820621 200812 1 001

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BAYU WARDANI, SE, MM**

NIP : 19650622 198603 2 016

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : **NUR ROHMAT, S.Sos, MSi**

NIP : 19690505 198903 1 008

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data realisasi APBD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Dua Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta, 5 Januari 2023

Pihak Ketiga

Pihak Kedua

Pihak Pertama



NUR ROHMAT, S.Sos, MSi

NIP. 19690505 198903 1 008

BAYU WARDANI, SE, MM

NIP. 19650622 198603 2 016



LAKSONO DEWANTO, SE, MM

NIP. 19820621 200812 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Lampiran I

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022

Uraian	Realiasi Bid Akt BPKAD	Realisasi SKPD	Selisih	Keterangan
Pendapatan	-			
Pendapatan Asli Daerah	-			
Pajak Daerah	-			
Retribusi Daerah	-			
Lain-Lain PAD yang Sah	-			
Belanja	31.886.633.959	31.886.633.959		
Belanja Pegawai	18.975.318.279	18.975.318.279		
Belanja Barang dan Jasa	12.775.369.480	12.775.369.480		
Belanja Subsidi	-	-		
Belanja Hibah	-	-		
Belanja Bantuan Sosial	-	-		
Belanja Modal	135.946.200	135.946.200		

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 terlampir.

Pihak Ketiga

NUR ROHMAT, S.Sos, MSi
NIP. 19690505 198903 1 008

Pihak Kedua

BAYU WARDANI, SE, MM
NIP. 19650622 198603 2 016

Pihak Pertama

LAKSONO DEWANTO, SE, MM
NIP. 19820621 200812 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Lampiran II

REKONSILIASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022

Uraian	Rekapitulasi Kasda	Rekapitulasi SKPD	Selisih	Keterangan
Penerimaan				
Pendapatan	0	0		
Pengembalian Pendapatan	0	0		
<i>Contrapost</i> Belanja	10.545.620	10.545.620		
Pengembalian UP dan TU	2.460.698.536	2.460.698.536		
Total	3.428.525.156	3.428.525.156		
Pengeluaran (SP2D)				
LS	19.003.592.199	19.003.592.199		
BTT dan Belanja Transfer	0	0		
UP	957.281.000	957.281.000		
GU	4.875.071.430	4.875.071.430		
TU	9.521.933.486	9.521.933.486		
Total	34.357.878.115	34.357.878.115		

Rincian Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 terlampir.

Pihak Ketiga

NUR ROHMAT, S.Sos, MSi
NIP. 19690505 198903 1 008

Pihak Kedua

BAYU WARDANI, SE, MM
NIP. 19650622 198603 2 016

Pihak Pertama



LAKSONO DEWANTO, SE, MM
NIP. 19820621 200812 1 001

LAMPIRAN

ASET LANCAR

- **BAP PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS**
- **ASURANSI DIBAYAR DIMUKA**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 SEMARANG 50132

Telp. 024 - 3517283-3517284-3556230 Fax. 024 3514351

Laman : inspektorat.jatengprov.go.id ; Surel : inspektorat@jatengprov.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
PADA GUDANG INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si

Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah selaku atasan langsung Penyimpan Barang telah mengadakan pemeriksaan barang pakai habis dan barang - barang inventaris yang menjadi tanggung jawabnya.

M ISA THORIQ A, S.Hum

Pengurus Barang pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal

Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap persediaan Barang Pakai Habis dan Barang Inventaris yang dibandingkan dengan kartu barang, buku penerimaan dan buku pengeluaran barang yang ada dalam pengurusannya terdapat keadaan sebagai berikut

NO	NAMA JENIS/ MACAM BARANG	SATUAN	MENURUT		SELISIH (-/+)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			CATATAN	KENYATAAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ATK							
1	Buku Kwarto garis 100 lembar	Buah	1	1	-	8.000	8.000
2	Buku Tulis Glatik	Buah	2	2	-	7.215	14.430
3	Stopmap	Buah	4	4	-	2.775	11.100
4	Stopmap Snelhecter	Buah	5	5	-	3.000	15.000
5	Ballpoint	Buah	1	1	-	20.000	20.000
6	Batu Batteray AAA	Buah	2	2	-	13.000	26.000
	Jumlah						94.530
Jumlah Seluruhnya							94.530

Pengurus Barang


M ISA THORIQ A.S.Hum
Penata Wada Tk I
NIP. 198807202011011011

Plt. INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH
Auditor Ahli Madya


DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si
Pengbina Tk I
NIP. 19731015 199703 1 002

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASURANSI DAN SEWA DIBAYAR DIMUKA 2022**

SKPD :INSPEKTORAT

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR KENDARAAN	NILAI KONTRAK PER BARANG YANG DISPKAN	JANGKA WAKTU ASURANSI		AKHIR TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARI	JUMLAH HARI YD JADI BEBAN	JUMLAH HARI YD JADI BELANJA DIBAYAR DIMUKA	BEBAN	BELANJA DIBAYAR DIMUKA	
					TANGGAL AWAL ASURANSI	TANGGAL AKHIR ASURANSI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6-10	12	13=5-12	
	ASURANSI			119.263.448,00							80.971.309,47	88.282.138,53	
1	Kendaraan Roda 4 atau lebih												
		2001	H 9524 HG	3.303.850,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	604.803,14	2.699.046,86
		2001	H 9511 HG	3.303.850,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	604.803,14	2.699.046,86
		2001	H 9512 HG	3.303.850,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	604.803,14	2.699.046,86
		2001	H 9510 HG	3.303.850,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	604.803,14	2.699.046,86
		2002	H 9519 HG	3.813.450,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	696.990,57	3.115.359,43
		2002	H 9524 NG	3.813.450,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	696.990,57	3.115.359,43
		2006	H 9527 LG	4.005.913,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	733.249,65	3.272.263,35
		2006	H 9517 SS	3.002.750,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	549.683,74	2.453.066,26
		2008	H 9517 SS	4.888.125,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	850.208,67	3.829.916,33
		2010	H 9505 FR	5.292.000,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	968.754,10	4.323.345,90
		2013	H 9520 BZ	4.785.980,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	876.122,02	3.909.857,98
		2015	H 1304 XG	4.785.980,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	876.122,02	3.909.857,98
		2015	H 1306 XG	4.785.980,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	876.122,02	3.909.857,98
		2015	H 1305 XG	4.785.980,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	876.122,02	3.909.857,98
		2014	H 9519 HZ	4.595.700,00	12-Sep-22	12-Sep-23	31-Dec-22	366	111		255	1.393.777,87	3.201.922,13
		2014	H 9529 JZ	4.595.700,00	12-Sep-22	12-Sep-23	31-Dec-22	366	111		255	1.393.777,87	3.201.922,13
		2013	H 9521 AZ	5.524.950,00	13-Mar-22	13-Mar-23	31-Dec-22	366	294		72	4.438.074,59	1.086.875,41
		2018	H 9503 TR	8.392.200,00	13-Mar-22	13-Mar-23	31-Dec-22	366	294		72	5.134.718,03	1.257.481,97
		2019	H 1072 XG	5.250.800,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	366	328		38	5.601.630,60	648.869,40
		2019	H 1187 XG	5.851.000,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	366	328		38	5.243.519,13	607.480,87
		2019	H 1074 XG	5.851.000,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	366	328		38	5.243.519,13	607.480,87
		2019	H 1073 XG	5.851.000,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	366	328		38	5.243.519,13	607.480,87
		2020	H 20	7.454.000,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	366	328		38	6.880.087,43	773.912,57
		2009	H 1746 XG	5.708.670,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	1.049.029,75	4.663.640,25
											137.112,02	611.887,98	
2	Kendaraan Roda 2 dan 3			749.000,00									
		2006	H 6838 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	8.270,99	36.910,83
		2006	H 6836 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	8.270,99	36.910,83
		2006	H 6837 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	8.270,99	36.910,83
		2006	H 6889 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	8.270,99	36.910,83
		2006	H 6840 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	8.270,99	36.910,83
		2014	H 9901 TG	59.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	10.833,83	48.347,99
		2014	H 9902 TG	59.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	10.833,83	48.347,99
		2015	H 6150 XG	101.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	18.522,35	82.659,46
		2015	H 6153 XG	101.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	18.522,35	82.659,46
		2015	H 6152 XG	101.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	18.522,35	82.659,46
		2015	H 6151 XG	101.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	18.522,35	82.659,46
											11.099.300,91	49.532.701,09	
3	Gedung dan Bangunan			60.632.002,00									
	Property All Risk			35.973.627,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	6.585.336,09	29.388.290,91
	Gempa Bumi			24.658.375,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	366	67		299	4.513.964,82	20.144.410,18
	JUMLAH			171.644.450,00							82.207.722,40	109.436.727,60	

Pt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Auditor Ahli Madya

DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si
Pegawai Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASURANSI DAN SEWA DIBAYAR DIMUKA 2022**

SKPD : INSPEKTORAT

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR KENDARAAN	NILAI KONTRAK PER BARANG YANG DISPJKAN	JANGKA WAKTU		AKHIR TAHUN ANGGARAN	JUMLA H HARI	JUMLA H HARI YG JADI	JUMLAH HARI YG JADI BELANJA DIBAYAR	BEBAN	BELANJA DIBAYAR DIMUKA
					TANGGAL AWAL ASURANSI	TANGGAL AKHIR ASURANSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13=5-12
	ASURANSI											
1	Kendaraan Roda 4 atau lebih			110.263.448,00							50.709.668,02	59.553.779,98
		2001	H 9524 HG	3.303.850,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	601.934,32	2.701.915,68
		2001	H 9511 HG	3.303.850,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	601.934,32	2.701.915,68
		2001	H 9512 HG	3.303.850,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	601.934,32	2.701.915,68
		2001	H 9510 HG	3.303.850,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	601.934,32	2.701.915,68
		2002	H 9519 HG	3.813.450,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	694.779,25	3.118.670,75
		2002	H 9524 NG	3.813.450,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	694.779,25	3.118.670,75
		2006	H 9527 LG	4.005.513,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	729.771,55	3.275.741,45
		2009	H 9517 SS	3.002.750,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	547.076,37	2.455.673,63
		2010	H 9505 FR	4.688.125,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	854.137,84	3.833.987,16
		2013	H 9520 BZ	5.292.000,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	964.158,90	4.327.841,10
		2015	H 1304 XG	4.785.980,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	871.966,22	3.914.013,78
		2015	H 1306 XG	4.785.980,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	871.966,22	3.914.013,78
		2015	H 1305 XG	4.785.980,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	871.966,22	3.914.013,78
		2014	H 9519 HZ	4.595.700,00	12-Sep-22	12-Sep-23	31-Dec-22	365	110,50	255,50	1.391.300,96	3.204.399,04
		2014	H 9529 JZ	4.595.700,00	12-Sep-22	12-Sep-23	31-Dec-22	365	110,50	255,50	1.391.300,96	3.204.399,04
		2013	H 9521 AZ	5.524.950,00	13-Mar-22	13-Mar-23	31-Dec-22	365	293,50	72,50	4.442.665,27	1.082.284,73
		2016	H 9503 TR	6.392.200,00	13-Mar-22	13-Mar-23	31-Dec-22	365	293,50	72,50	5.140.029,32	1.252.170,68
		2019	H 1072 XG	6.250.600,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	365	327,50	38,50	5.608.415,07	642.184,93
		2019	H 1187 XG	5.851.000,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	365	327,50	38,50	5.249.869,86	601.130,14
		2019	H 1074 XG	5.851.000,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	365	327,50	38,50	5.249.869,86	601.130,14
		2019	H 1073 XG	5.851.000,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	365	327,50	38,50	5.249.869,86	601.130,14
		2020	H 20	7.454.000,00	07-Feb-22	07-Feb-23	31-Dec-22	365	327,50	38,50	6.688.178,08	765.821,92
		2009	H 1746 XG	5.708.670,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	50,50	315,50	789.829,68	4.918.840,32
2	Kendaraan Roda 2 dan 3			749.000,00							136.461,68	612.538,32
		2006	H 6838 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	8.231,76	36.950,06
		2006	H 6836 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	8.231,76	36.950,06
		2006	H 6837 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	8.231,76	36.950,06
		2006	H 6869 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	8.231,76	36.950,06
		2006	H 6840 XG	45.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	8.231,76	36.950,06
		2014	H 9901 TG	59.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	10.782,44	48.399,38
		2014	H 9902 TG	59.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	10.782,44	48.399,38
		2015	H 6150 XG	101.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	18.434,50	82.747,32
		2015	H 6153 XG	101.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	18.434,50	82.747,32
		2015	H 6152 XG	101.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	18.434,50	82.747,32
		2015	H 6151 XG	101.181,82	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	18.434,50	82.747,32

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR KENDARAAN	NILAI KONTRAK PER BARANG YANG DISPKAN	JANGKA WAKTU		AKHIR TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARI	JUMLAH HARI YG JADI	JUMLAH HARI YG JADI BELANJA DIBAYAR	BEBAN	BELANJA DIBAYAR DIMUKA
					TANGGAL AWAL ASURANSI	TANGGAL AKHIR ASURANSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13=5-12
3	Gedung dan Bangunan			60.632.002,00								
	Property All Risk			35.973.627,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	11.046.652,42	49.585.349,58
	Gempa Bumi			24.658.375,00	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	6.554.099,17	29.419.527,83
	Terorisme dan Sabotase			-	26-Oct-22	26-Oct-23	31-Dec-22	365	66,50	299,50	4.492.553,25	20.165.821,75
4	Barang Milik Daerah Lainnya			-								
					01-Jan-20	31-Dec-20	31-Dec-20	365	365,50	0,50	-	-
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS											
					01-Jan-20	31-Dec-20	31-Dec-20	365	366	-	-	-
6	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS											
					01-Jan-20	31-Dec-20	31-Dec-20	365	366	-	-	-
	JUMLAH			171.644.450,00							61.892.782,12	109.751.667,88
	SEWA											
1	Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung			-							-	-
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			-							-	-
3	Belanja Sewa Alat Berat			-							-	-
4	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor			-							-	-
											-	-
	JUMLAH			-							-	-

Pt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH

Auditor Ahli Madya



DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat

NIP. 19751015-199703 1 002

LAMPIRAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

- **BELANJA MODAL KOMPUTER**
- **BELANJA MODAL KURSI DAN MEJA**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
SEMARANG 50132
surel: inspektorat@jatengprov.go.id, laman: inspektorat.jatengprov.go.id

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG / PEKERJAAN

Nomor : 027 / 472 / 1.3 / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua, telah diadakan Serah Terima Barang/Pekerjaan dari CV. OASE AZ-ZAHRA dengan alamat Jl. Bukit Mawar II / F 138 Semarang, berdasarkan SPK Nomor : 027 / 372 / 1.3 / 2022 tanggal 15 Februari 2022, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Komputer pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dikerjakan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK);
2. Pengadaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 % dengan hasil baik dan telah dilakukan Serah Terima Barang / Pekerjaan;
3. Berita Acara ini dapat digunakan sebagai dasar pembayaran kepada CV. OASE AZ-ZAHRA dengan alamat Jl. Bukit Mawar II / F 138 Semarang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang, Menyerahkan,

CV. OASE AZ-ZAHRA



EDDY ADJI SANTOSO, S.Kom
Direktur

Yang Menerima,

Pengurus Barang
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

M. ISA THORIO A. S. Hum
Penata Muda
NIP. 198807202011011011

MENGETAHUI,

Pit. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Inspektur Pembantu Khusus
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002

MENYETUJUI,

KEPALA SUB BAGIAN
ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SRI RAHAYUNINGSIH, SE, MM.
Pembina
NIP. 19671113 199110 2 001



cv. OASE Az-zahra

Hardware - Software - Networking - Maintenance Computer - Pengadaan ATK

Jl. Bukit Mawar II / F138, Semarang

Head Office : Jl. Tegalsari Perbalan No. 22, Semarang

Telp : 085100202424 / 08164887264

TANDA TERIMA BARANG / JASA

Pekerjaan Pengadaan Komputer pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN
1	Personal Komputer + OS	Processor: Intel Core i5-10400 Motherboard B560M RAM: 8 GB DDR4 SSD: 512 Gb VGA Card 2 Gb Monitor : LCD Samsung 23,5" Case ATX 500 WATT Keyboard Mouse Logitech Web Cam OS: Windows 10	6	unit
2	Laptop LENOVO YOGA C640-13IML	Processor: Intel Core i7-10510U Memori : 16GB DDR4 SSD : 512GB Monitor : LCD 13,3" FHD IPS, anti glare, touchscreen 300 nits. Kamera : HD 720P OS : Windows 10 + OHS	1	unit

Semarang, 24 Februari 2022

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

KEPALA SUB BAGIAN
ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

CV. OASE AZ-ZAHRA

Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SRI RAHAYUNINGSIH, SE, MM.

Pembina

NIP. 19671113 199110 2 001



EDDY ADJI SANTOSO, S.Kom

Direktur

Faktur Pengiriman Barang
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA BARANG	MERK	DESKRIPSI	VOLUME	
1	Meja Lipat	PUMATECH	Meja 1/2 biro uk. 120 x60 x75 bahan Multiplek lapis HPL dgn rangka besi hollo bisa dilipat	10	Set

Pengirim

CV MAJU BERSAMA



Penerima

KEPALA SUB BAGIAN
ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NIP. 19671113 199110 2 001

Ungaran, 28 Maret 2022

Kepada Yth.

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan INSPEKTORAT
PROV. JAWA TENGAH

Di -

Semarang

TANDA TERIMA PENERIMAAN BARANG

No. 28.183/TPL-G/III/2022

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Kursi Direktur merk Savello type Fusio H warna Hitam	10 Unit

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah



Sri Rahayuningsih, SE, MM
NIP. 19671113199110 2 001

Hormat kami,

★ **CV. TALENTA**
PRASSIDHA LESTARI

Adi Prassidha, SE
Direktur